



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl.Jenderal Sudirman Km.5,5 Telp.(0531) 21254, 30524,Fax.30523, 30525 Kotak Pos 31

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR : 89 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, perlu Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) :
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2 );
13. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 234);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 25 maret 2019 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;

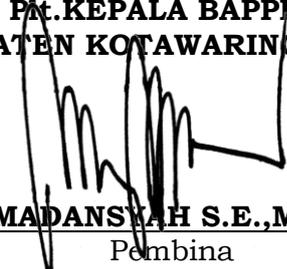
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021.
- PERTAMA** : Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum pertama merupakan landasan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sampit  
Pada Tanggal 25 April 2019

**PA. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**RAMADANSYAH S.E., M.Ec.Dev**

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit ( sebagai laporan )
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
5. Arsip

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA</b> .....   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 2         |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 5         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 7         |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....   | 8         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA</b> .....  | <b>10</b> |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....  | 13        |
| 2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | 13        |
| 2.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | 14        |
| 2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.....   | 17        |
| 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | 19        |
| 2.2.1. Sumberdaya Aparatur .....  | 19        |
| 2.2.2. Sarana dan Prasarana .....   | 25        |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | 29        |
| 2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.....   | 29        |
| 2.3.2. Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021 .....  | 31        |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur-  | 36        |
| <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....   | <b>44</b> |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda<br>Kabupaten Kotawaringin Timur ..... | 46        |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Terpilih .....                        | 54        |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....  | 60        |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....                             | 65        |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....  | 68        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI &amp; KEBIJAKAN ---</b>                                     | <b>71</b>  |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur -----                             | 73         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----</b>   | <b>79</b>  |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur -----  | 80         |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF -----</b> | <b>86</b>  |
| 6.1. Rencana Program dan Kegiatan -----  | 88         |
| 6.2. Indikator Pencapaian Tujuan -----   | 93         |
| <b>BAB VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----</b>                      | <b>103</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP -----</b>  | <b>114</b> |
| 8.1. Kesimpulan -----  | 115        |
| 8.2. Kaidah Pelaksanaan -----  | 116        |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. TABEL T-C. 23
2. TABEL T-C. 24
3. TABEL T-C. 25
4. TABEL T-C. 26
5. TABEL T-C. 27
6. TABEL T-C. 28
7. TABEL EVALUASI RENJA

**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada tanggal 24 Nopember 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Bappaeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Bappeda
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya.

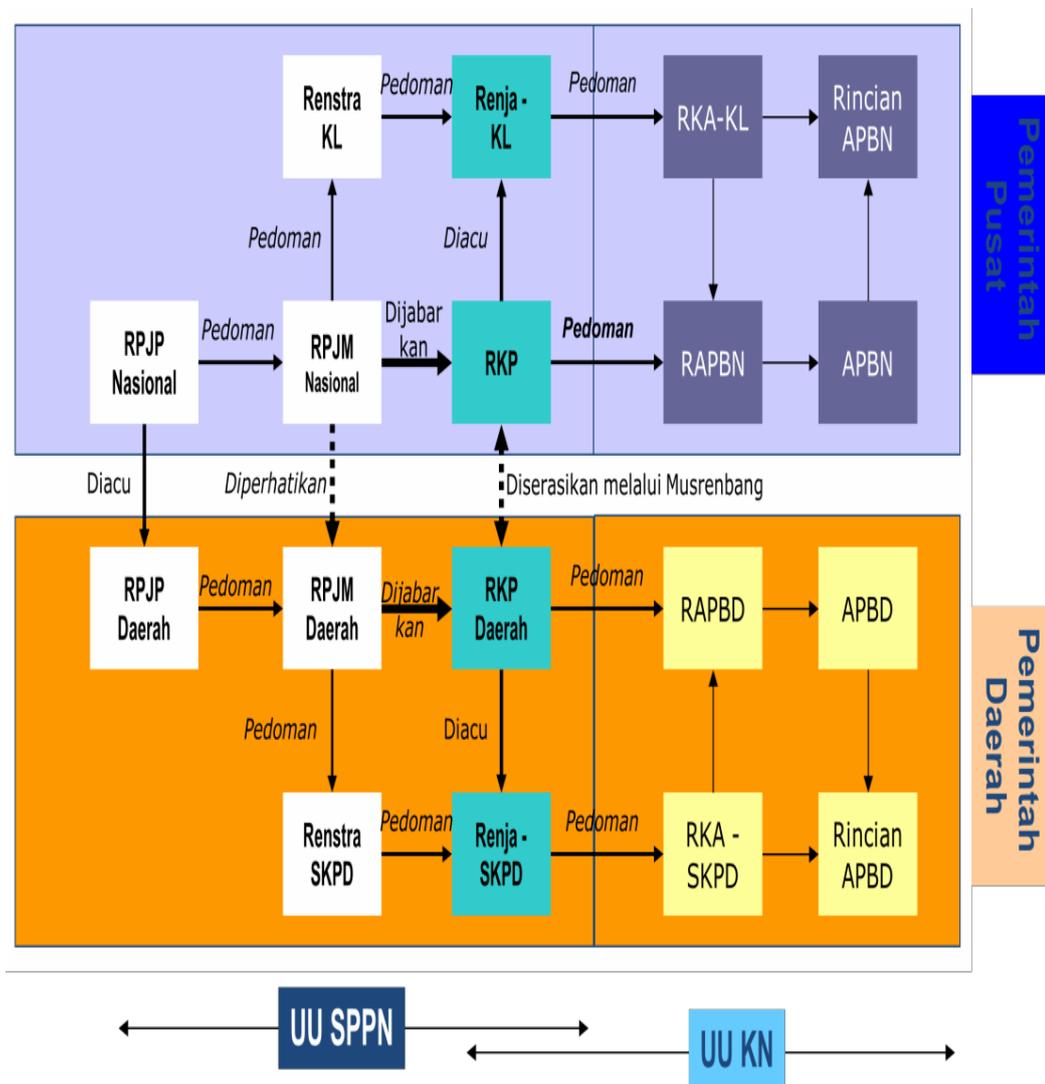
Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, maka secara otomatis Renstra Bappeda juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Bappeda juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah untuk menggambarkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;

2. Menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan;
3. Memantapkan perencanaan pembangunan daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta memudahkan dalam evaluasi dan pengendalian program pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2. Sumberdaya Bappeda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.2. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.4. Strategi dan Kebijakan Bappeda

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### BAB VIII. PENUTUP

**BAB**

**2**

**GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d , dan Pasal 260 ayat (2) , bahwa Bappeda sesuai

dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaan maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di lingkungan Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, sehingga masyarakat, *stakeholders*, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan berupaya secara kontinyu menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi terdapat hal positif lainnya yaitu, Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang telah dibentuk sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kotawaringin Timur.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda**

### **2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pada Bab III Pasal 5 huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan;
2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

### **2.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah;
4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi.
5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;

9. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan
10. pengoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas, Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja Bappeda memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).

Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan:

- 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
  - perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten
  - pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan :
  - perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:
    - memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan Kecamatan;

- mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
  - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD tingkat Provinsi;
  - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional.
- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
  - penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.
- 3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :
- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- 4) Monitoring dan evaluasi :
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa;
  - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kecamatan/Desa;
  - pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- 5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan ;
- perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi ;
- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten ;
- penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten;
- pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten.

### **2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.**

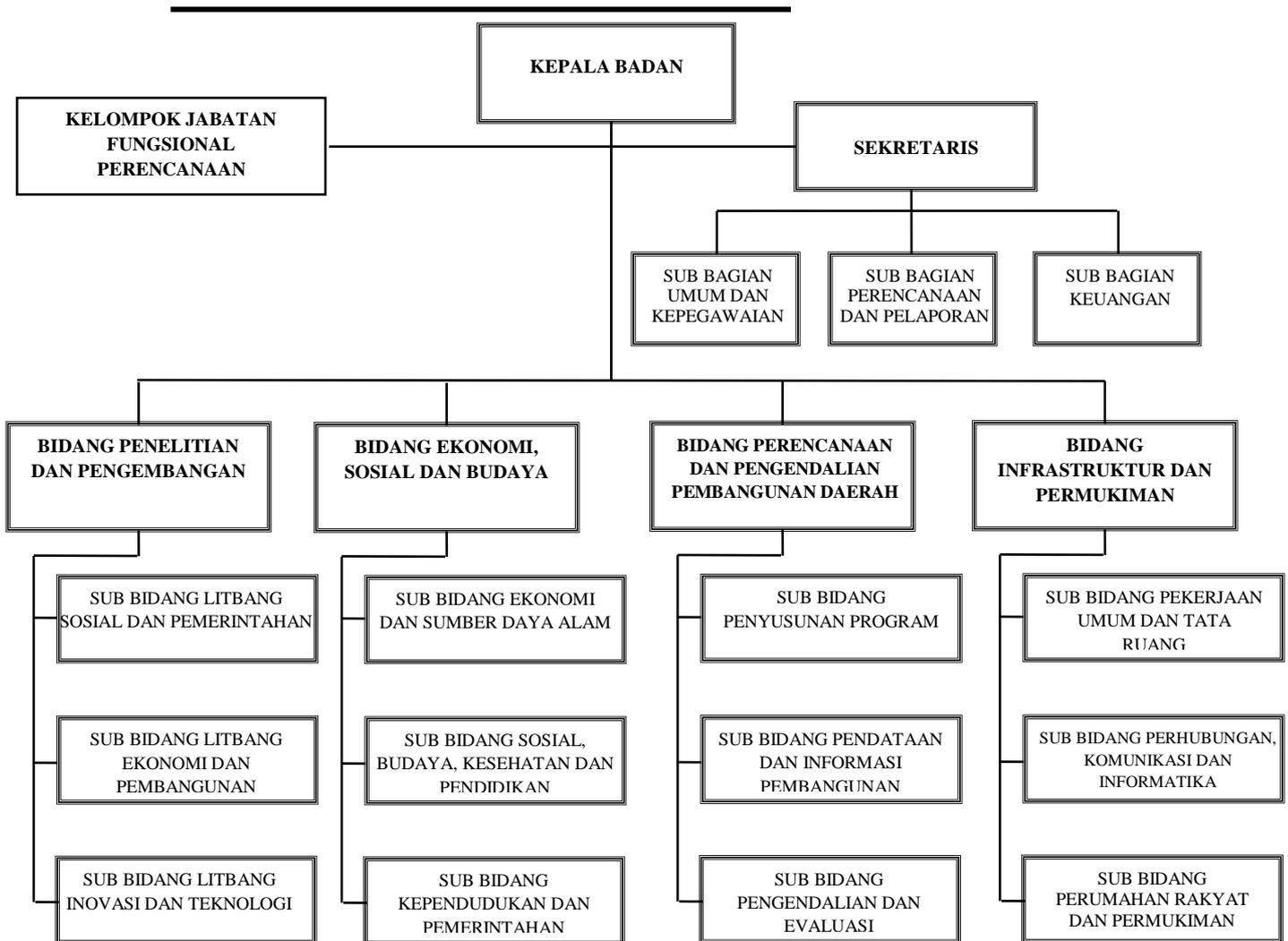
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
    - b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
    - c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
  2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
    - a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam
    - b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.

- c) SubBidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
  - a) Sub Bidang Penyusunan Program
  - b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan
  - c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- 4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.
  - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  - b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

d. Kelompok jabatan fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



## 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

### 2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur sebanyak 52 orang, terdiri dari 46 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer/kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian, 2012 – 2018**

| No. | STATUS<br>PEGAWAI    | JUMLAH    |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| (1) | (2)                  | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       |
| 1.  | PNS                  | 58        | 54        | 58        | 55        | 54        | 49        | 46        |
| 2.  | Honorer /<br>Kontrak | 4         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 6         |
|     | <b>Jumlah</b>        | <b>62</b> | <b>58</b> | <b>62</b> | <b>60</b> | <b>59</b> | <b>54</b> | <b>52</b> |

Sumber :Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2012-2018

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

#### a. Keadaan Aparatur Menurut Golongan Ruang

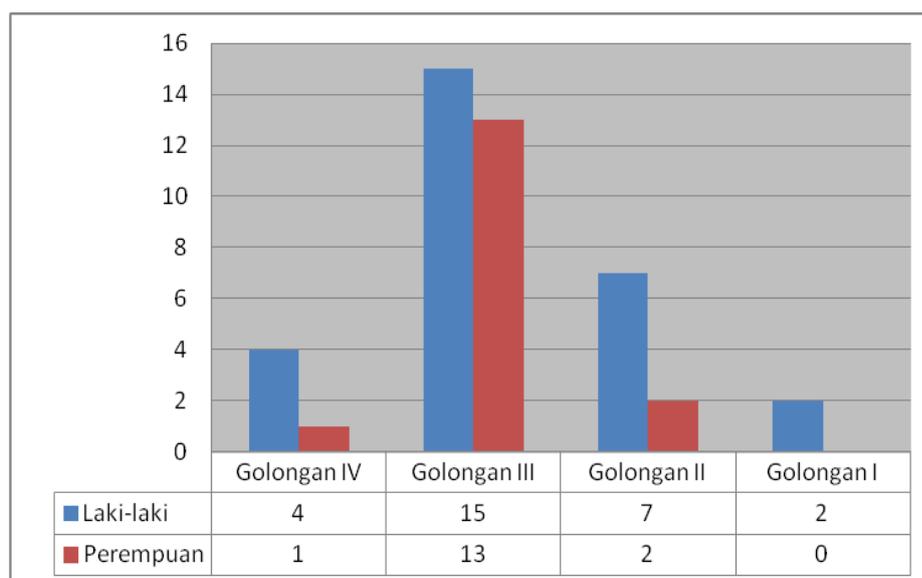
Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diketahui bahwa keadaan Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 di dominasi oleh golongan III, yang berjumlah 30 orang atau 65,21%, sedangkan golongan ruang terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 4,34%. Untuk itu akan diupayakan peningkatan pangkat dan golongan ruang khususnya bagi pegawai golongan I dengan penyesuaian tingkat pendidikan.

**Tabel 2.2**  
**Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, 2013 – 2018**

| NO.           | PANGKAT/GOL/RUANG | JUMLAH APARATUR |           |           |           |           |           |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                   | 2013            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| (1)           | (2)               | (3)             | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       |
| 1.            | Golongan IV       | 8               | 8         | 9         | 9         | 7         | 5         |
| 2.            | Golongan III      | 35              | 37        | 36        | 35        | 32        | 30        |
| 3.            | Golongan II       | 9               | 9         | 6         | 6         | 7         | 9         |
| 4.            | Golongan I        | 2               | 4         | 4         | 4         | 3         | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>54</b>       | <b>58</b> | <b>55</b> | <b>54</b> | <b>49</b> | <b>46</b> |

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana kondisi Aparatur Bappeda Kab. Kotim menurut golongan ruang dapat lihat dalam Gambar 2.1 berikut ini.



**Gambar 2.1 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Bappeda Kab. Kotim Tahun 2018**

b. Keadaan Aparatur Menurut Jabatan/Eselonering

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 adalah : 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, 15

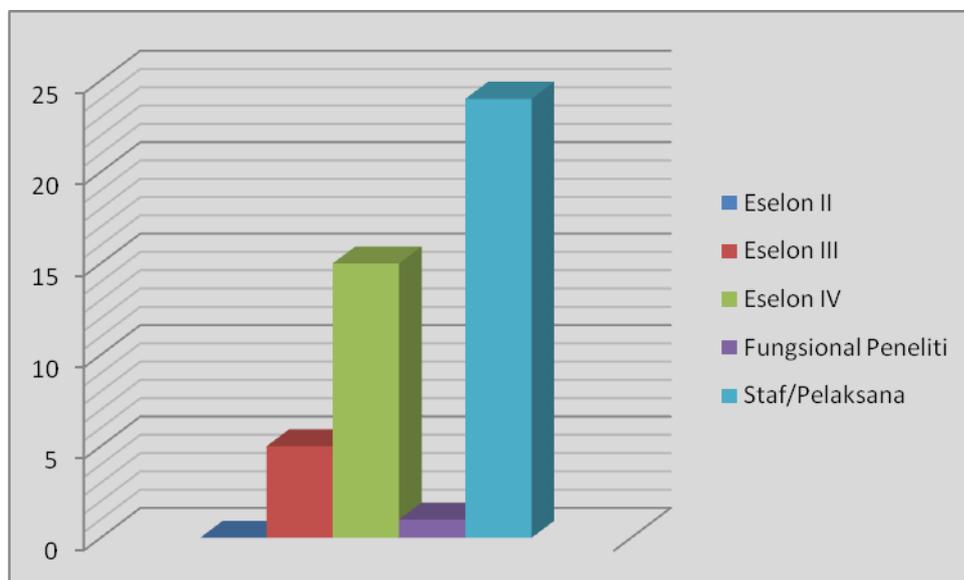
(lima belas) orang Eselon IV, serta 1 (satu) orang Fungsional Peneliti dan 24 orang non eselon.

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2013 – 2018**

| NO.           | JABATAN                        | JUMLAH APARATUR |           |           |           |           |           |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                                | 2013            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| (1)           | (2)                            | (3)             | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       |
| 1.            | Eselon II                      | 1               | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         |
| 2.            | Eselon III                     | 8               | 8         | 8         | 8         | 5         | 5         |
| 3.            | Eselon IV                      | 17              | 17        | 17        | 16        | 15        | 15        |
| 4.            | Fungsional Peneliti            | 0               | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         |
| 5.            | Staf/Pelaksana/Fungsional Umum | 28              | 32        | 29        | 29        | 28        | 25        |
| <b>JUMLAH</b> |                                | <b>54</b>       | <b>58</b> | <b>55</b> | <b>54</b> | <b>49</b> | <b>46</b> |

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana gambaran Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Jabatan/Eselon pada Tahun 2018 dapat lihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.



**Gambar 2.2 Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselonering Tahun 2018**

c. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Bappeda sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan dapat memberi andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas pelayanan Bappeda.

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh bahwa pendidikan Aparatur di lingkungan Bappeda Kab. Kotim di dominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 50%.

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2013 - 2018**

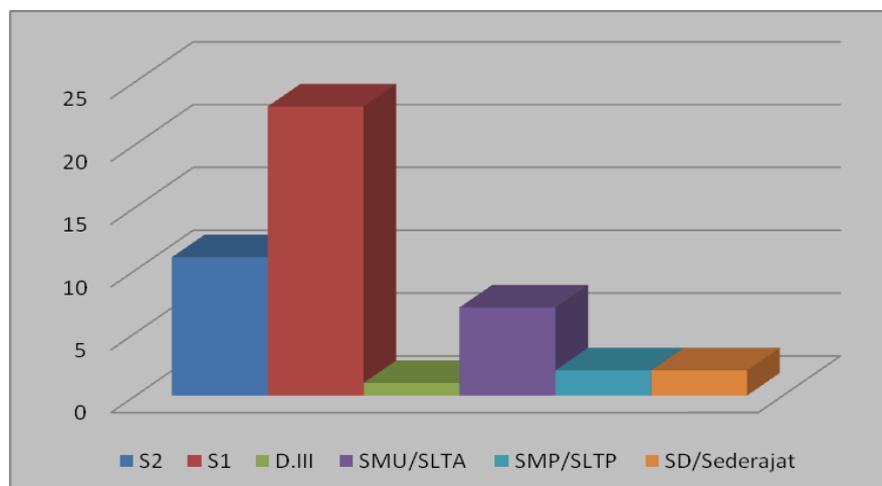
| NO.           | PENDIDIKAN         | JUMLAH APARATUR |           |           |           |           |           |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                    | 2013            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| (1)           | (2)                | (3)             | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       |
| 1.            | S2                 | 12              | 12        | 12        | 12        | 11        | 11        |
| 2.            | S1                 | 29              | 32        | 31        | 30        | 25        | 23        |
| 3.            | D.III              | 3               | 3         | 2         | 2         | 1         | 1         |
| 4.            | SMU/SLTA Sederajat | 8               | 8         | 7         | 7         | 6         | 7         |
| 5.            | SMP/SLTP Sederajat | 1               | 1         | 1         | 1         | 2         | 2         |
| 6.            | SD/Sederajat       | 1               | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>54</b>       | <b>58</b> | <b>55</b> | <b>54</b> | <b>47</b> | <b>46</b> |

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kab. Kotim, 2013-2018

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup baik, yang

mana pada Tahun 2018 dari 46 orang Aparatur Sipil Negara terdapat 34 orang atau 73,91% berpendidikan Sarjana, baik S1 dan S2. Dari jumlah Aparatur tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sangat kekurangan pegawai, yang mana di beberapa bidang masih banyak tenaga pelaksana atau staf yang kosong, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan cukup banyak memerlukan waktu. Oleh karena itu, dengan banyaknya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan maka tidak menutup kemungkinan Aparatur bekerja sampai lewat jam kerja.

Pada Tahun 2018 terdapat 11 orang bergelar Magister, serta 24 orang bergelar Sarjana dan Diploma dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. Beragamnya disiplin ilmu Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kelebihan dalam luasnya cakupan bidang pekerjaan pada Bappeda yang meliputi perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara sederhana dapat dilihat Gambar 2.3 berikut ini.



**Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

d. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

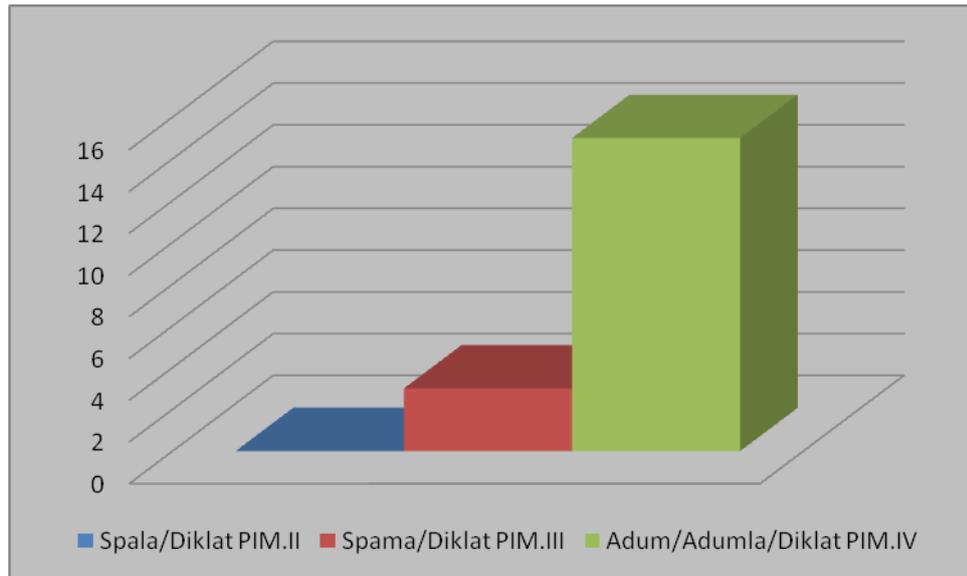
Di samping pendidikan formal, pegawai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapatkan pendidikan nonformal berupa diklat struktural maupun diklat fungsional. Data pada Tabel 2.5 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada Tahun 2018 berjumlah 23 orang atau 41,82%. Bila dilihat dari seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan sekiranya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau mengikuti diklat baik struktural maupun fungsional.

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti**

| NO.           | PENDIDIKAN                | JUMLAH APARATUR |           |           |           |           |           |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                           | 2013            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| (1)           | (2)                       | (3)             | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       |
| 1.            | Spala/Diklat PIM.II       | 1               | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         |
| 2.            | Spama/Diklat PIM.III      | 4               | 5         | 6         | 6         | 3         | 3         |
| 3.            | Adum/Adumla/Diklat PIM.IV | 17              | 17        | 16        | 17        | 12        | 15        |
| <b>JUMLAH</b> |                           | <b>22</b>       | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>16</b> | <b>18</b> |

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat Gambar 2.4 berikut ini.



**Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda dari segi sarana dan prasarana, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah cukup memadai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kab. Kotim memiliki 3 (tiga) gedung. Setiap ruangan kerja ASN dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC), prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, serta jaringan WiFi. Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, sampai saat ini Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih membutuhkan ruang rapat yang bersifat representatif, ruang arsip, ruang perpustakaan dan ruang data center. Data sumberdaya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Fasilitas Pendukung Kinerja (Perlengkapan) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

| No. | Nama Barang                        | Jumlah<br>(Dalam Bidang/Unit/Buah) |                |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|     |                                    |                                    |                |
| 1.  | Tanah                              | ± 27.608                           | M <sup>2</sup> |
| 2.  | Bangunan Gedung                    | 22                                 | Unit           |
| 3.  | Listrik                            | 2                                  | Jaringan       |
| 4.  | Air                                | 1                                  | Sumur Bor      |
| 5.  | Area Parkir                        | 2                                  | Area           |
| 6.  | Bangunan/Konstruksi Taman Kantor   | 2                                  | Unit           |
| 7.  | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen   | 1                                  | Unit           |
| 8.  | Asrama Semi Permanen               | 5                                  | Unit           |
| 9.  | Mesin Pompa Air                    | 1                                  | Buah           |
| 10. | Mesin Ketik Elektronik/Selektrik   | 1                                  | Buah           |
| 11. | Filling Besi/Metal                 | 1                                  | Buah           |
| 12. | Lemari Kayu                        | 2                                  | Buah           |
| 13. | Meja Komputer                      | 2                                  | Buah           |
| 14. | Karpet                             | 1                                  | Buah           |
| 15. | Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner | 1                                  | Buah           |
| 16. | Mesin Potong Rumput                | 2                                  | Buah           |
| 17. | Alat Pemadam Portable              | 5                                  | Buah           |
| 18. | Lemari Arsip                       | 20                                 | Buah           |
| 19. | Global Positioning System (GPS)    | 2                                  | Buah           |
| 20. | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1                                  | Buah           |
| 21. | Rak Besi/Metal                     | 8                                  | Buah           |
| 22. | Brand Kas                          | 1                                  | Buah           |
| 23. | Mesin Absensi                      | 1                                  | Buah           |
| 24. | Papan Nama Ruangan/Jabatan         | 2                                  | Buah           |
| 25. | Mesin Gergaji                      | 1                                  | Unit           |
| 26. | Rangka Baliho                      | 1                                  | Unit           |
| 27. | Kursi Tamu                         | 1                                  | Set            |
| 28. | Kursi Putar                        | 64                                 | Buah           |
| 29. | Koperasi                           | 1                                  | Buah           |
| 30. | Kantin                             | 1                                  | Buah           |

|     |  |    |      |
|-----|--|----|------|
| 31. | Musholla                               | 1  | Buah |
| 32. | Toilet                                 | 10 | Buah |
| 33. | Jeep                                   | 1  | Unit |
| 34. | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 7  | Unit |
| 35. | Sepeda Motor                           | 27 | Unit |
| 36. | Meja Rapat                             | 60 | Set  |
| 37. | Kursi Tamu                             | 1  | Set  |
| 38. | Sofa                                   | 3  | Set  |
| 39. | Gordyn                                 | 2  | Buah |
| 40. | Rak TV                                 | 1  | Buah |
| 41. | Mesin Potong Rumput                    | 2  | Buah |
| 42. | Lemari Es                              | 1  | Buah |
| 43. | Dispenser                              | 2  | Buah |
| 44. | Alat Prasmanan                         | 1  | Set  |
| 45. | Televisi                               | 1  | Buah |
| 46. | Televisi + Home Theater                | 1  | Set  |
| 47. | Sound System                           | 2  | Unit |
| 48. | Camera Video                           | 4  | Unit |
| 49. | Handy Cam                              | 2  | Unit |
| 50. | Tandon Air/Profil                      | 2  | Buah |
| 51. | Microphone/Wireless Mic                | 1  | Buah |
| 52. | Mesin Jilid                            | 1  | Buah |
| 53. | Handy Talky                            | 4  | Buah |
| 54. | CCTV                                   | 1  | Set  |
| 55. | Surger Protestor anti Petir            | 2  | Set  |
| 56. | Komputer PC                            | 23 | Unit |
| 57. | Notebook                               | 15 | Unit |
| 58. | Laptop                                 | 13 | Unit |
| 59. | Hard Disk                              | 2  | Buah |
| 60. | Printer                                | 27 | Unit |
| 61. | Scanner                                | 1  | Buah |
| 62. | CPU                                    | 2  | Unit |
| 63. | UPS                                    | 24 | Unit |

|     |                        |    |      |
|-----|------------------------|----|------|
| 64. | Router                 | 3  | Buah |
| 65. | Monitor                | 6  | Buah |
| 66. | Meja Kerja             | 16 | Buah |
| 67. | Kursi Kerja            | 5  | Buah |
| 68. | Proyektor + Attachment | 6  | Buah |
| 69. | Area Taman Luar        | 1  | Area |
| 70. | Lemari Arsip           | 40 | Buah |
| 71. | Genset                 | 2  | Unit |
| 72. | AC Split               | 40 | Unit |
| 73. | Kulkas                 | 3  | Buah |

*Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018*

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur cukup memadai dalam menunjang dan mendukung suasana kerja yang efektif. Berkaitan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset (barang dan kendaraan), Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memiliki permasalahan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset serta telah memenuhi syarat pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal peningkatan perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi menjadi hal yang penting bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian pembangunan di Bappeda. Berbagai sumber data dan informasi telah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan daerah, diantaranya :

- a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- b. Satuan kerja pada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi; dan
- d. Masyarakat (yang dilakukan melalui dialog publik).

Sumber data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan karena analisis kondisi daerah akan menentukan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang ada.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kecamatan, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan, dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan;

#### **2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Dalam kurun waktu 2016-2018 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian suatu indikator kinerja pelayanan merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda telah direview, mulai pemilihan sasaran strategis, indicator kinerja sasaran hingga formula yang tepat dalam

penghitungan data pencapaian indicator. Dalam proses melakukan perubahan RPJMD, masing masing SOPD melakukan review dan perubahan indicator dan sasaran pada Renstra, dan tidak terlepas dari saran dan arahan dari Kemenpan RB. Sehingga hasil pencapaian indicator kinerja pelayanan SOPD ditampilkan dalam beberapa tabel T.C.23 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran . Hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah diverifikasi dan disetujui oleh fasilitator dari Kemenpan RB dan Tim evaluasi Sakip, dapat dilihat pada Tabel 2.7 yang mengacu pada tabel T-C. 23( T-C.23 terlampir) adalah berikut :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Tahun 2016 – 2021 (sebelum Perubahan)**

| Sasaran   | Indikator Kinerja                           | TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN KE- |      |      | REALISASI CAPAIAN TH. KE- |      |      | RATA-RATA CAPAIAN TAHUN KE- |      |      |
|---|---|----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|
|   |   | 2016                             | 2017 | 2018 | 2016                      | 2017 | 2018 | 2016                        | 2017 | 2018 |
|   |   |                                  |      |      |                           |      |      |                             |      |      |
| meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD     | 100%                             | 100% | 100% | 100%                      | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% |
|   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD | 100%                             | 100% | 100% | 100%                      | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% |
|   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD    | 100%                             | 100% | 100% | 100%                      | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% |

|   |  |     |     |     |       |       |       |     |       |     |
|---|--|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Meningkatnya pembangunan sesuai dengan perencanaan  | Persentase capaian target RPJMD  | 95% | 95% | 95% | 92%   | 93%   | 87%   | 96% | 97,8% | 91% |
|   | Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi anggaran > 76%)  | 95% | 95% | 95% | 86,5% | 88,5% | 92,3% | 91% | 93%   | 97% |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian dalam perencanaan pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan | 0   | 0   | 1   | 0     | 50%   | 0     | 0   | 50%   | 0   |

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review dilakukan revisi terhadap beberapa hal yaitu ;

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun terdahulu dapat diketahui dari capaian rencana strategis periode 2016 - 2021.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. sesuai dengan hasil review, dilakukan revisi terhadap beberapa hal yaitu ;

5. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
6. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
7. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
8. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Selain itu juga renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan Bappeda, perlu dilihat indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi. Untuk menggambarkan target kinerja pelayanan bappeda, indikator tujuan dan sasaran renstra Bappeda akan disajikan pada tabel (menngacu pada T.C. 25) adalah berikut :

**Tabel 2.8**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**  
**Tahun 2016 – 2021 (setelah perubahan Rensta)**

| Tujuan PD  | Indikator Kinerja Tujuan PD        | Sasaran PD  | Indikator Kinerja Sasaran PD  | target Indikator Sasaran PD |           |           |           |           |           |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                    |   |   | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 2016                        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan   | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD   | 100%                        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|  |                                    |   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD   | 100%                        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|  |                                    |   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD  | 100%                        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|  |                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan                     | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah  | B                           | B         | B         | B         | B         | B         |
|  |                                    | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | 50%                         | 50%       | 50%       | 50%       | 50%       | 50%       |
|  |                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan                   | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan                        | Memuaskan                   | Memuaskan | Memuaskan | Memuaskan | Memuaskan | Memuaskan |

Tabel 2.9.

## Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tahun 2016 – 2021 (setelah perubahan Renstra)

| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | Capaian Kinerja Tahun ke- |           |        |           |        |           | Target Kinerja Tahun ke- |           |           |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |
|--|------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                                    |   |  | 2016                      |           | 2017   |           | 2018   |           | 2019                     |           | 2020      |           | 2021      |           |  |
| 1  | 2                                  | 3   | 4  | 5                         |           | 6      |           | 7      |           | 8                        |           | 9         |           | 10        |           |  |
|  |                                    |   |  | Target                    | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target                   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target    | Realisasi |  |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan | N/A                       | N/A       | N/A    | N/A       | N/A    | N/A       | Memuaskan                | N/A       | Memuaskan | N/A       | Memuaskan | N/A       | Memuaskan                                  |
|  |                                    | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah                  | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD                        | N/A                       | N/A       | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                       |
|  |                                    |   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD                    | N/A                       | N/A       | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                       |

|  |  |   |   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD  | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan                     | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | N/A | N/A | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    |
|  |  | <b>Sasaran 4</b><br>Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | N/A | N/A | 100% | 50%  | 50%  | 0%   | 50%  | 0%   | 50%  | NA   | 50%  | N/A  | 50%  |

Beberapa faktor keberhasilan pada pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dalam upaya mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan indikator kinerja persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dalam arti terpenuhinya aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan keterukuran dalam dokumen RKPD. Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.
3. Proses partisipatif , terkait dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui konsultasi publik, forum gabungan perangkat daerah dan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Peran serta Tim verifikator dalam pelaksanaan tugas pelayanan pada mitra kerja dalam memverifikasi keselarasan dokumen renja dan renstra SOPD terhadap RKPD dan RPJMD. sehingga target indikator sejak tahun 2017 dapat tercapai sebesar 100%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja baik secara *internal* maupun *eksternal*. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang

sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan, serta pencapaian pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan “syarat mutlak” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tantangan yang dihadapi kedepan adalah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dapat bersinergi dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, tingginya sumberdaya serta sarana dan prasarana dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah, Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”,(DAMAI dan MANTAP). Dalam usaha pencapaian Kabupaten Kotawaringin Timur DAMAI dan MANTAP, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki dinamika tantangan (*Threat*) pembangunan sebagai berikut :

1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;
2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
3. Perkembangan kawasan/wilayah Kabupaten tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
4. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;

Sementara untuk peluang (*oppurtunity*) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotim terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah;

3. Kewenangan dan peran Bappeda yang semakin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
4. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
5. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti *e-planning*, *e-monev*, *e-proc* dan sebagainya;
7. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD);
9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
10. Memberikan dukungan untuk menyusun *road map* ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Uraian   | Anggaran pada tahun (Rp (000)) |           |           |           |           |           | Realisasi pada tahun (Rp (000)) |           |           |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |        |        |      |      |      |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|---|--------|--------|------|------|------|
|  | 2016                           | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2016                            | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                                      | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)                            | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)                             | (9)       | (10)      | (11) | (12) | (13) | (14)                                      | (15)   | (16)   | (17) | (18) | (19) |
| <b>BELANJA DAERAH</b>  | 11,429,271                     | 9,437,677 | 9,063,754 | 9,591,361 | 4,528,010 | 3,780,407 | 9,878,656                       | 8,274,659 | 8,344,746 | -    | -    | -    | 86.43                                     | 87.68  | 92.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | 4,203,253                      | 4,697,550 | 4,591,853 | 4,857,333 | -         | -         | 3,689,357                       | 4,316,573 | 4,273,953 | -    | -    | -    | 87.77                                     | 91.89  | 93.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Belanja pegawai  | 4,203,253                      | 4,697,550 | 4,591,853 | 4,857,333 | -         | -         | 3,689,357                       | 4,316,573 | 4,273,953 | -    | -    | -    | 87.77                                     | 91.89  | 93.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | 7,226,018                      | 4,740,127 | 4,471,901 | 4,734,028 | 4,528,010 | 3,780,407 | 6,189,299                       | 3,958,086 | 4,070,793 | -    | -    | -    | 85.65                                     | 83.50  | 91.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | 2,289,883                      | 2,046,193 | 1,918,034 | 1,962,448 | 2,299,682 | 2,136,772 | 2,142,593                       | 1,797,838 | 1,818,105 | -    | -    | -    | 93.57                                     | 87.86  | 94.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | -                              | 2,700     | 1,800     | 1,650     | 1,850     | 1,850     | -                               | 2,700     | 1,800     | -    | -    | -    | 0.00                                      | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 240,971                        | 210,608   | 177,612   | 195,720   | 345,520   | 345,520   | 201,054                         | 192,907   | 168,235   | -    | -    | -    | 83.43                                     | 91.60  | 94.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | -                              | -         | -         | -         | -         | -         | -                               | -         | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 83,476                         | 96,053    | 32,503    | 47,046    | 87,500    | 87,500    | 58,960                          | 33,880    | 14,566    | -    | -    | -    | 70.63                                     | 35.27  | 44.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 151,760                        | 119,254   | 199,071   | 205,051   | 180,000   | 180,250   | 138,490                         | 113,544   | 191,296   | -    | -    | -    | 91.26                                     | 95.21  | 96.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 106,262                        | 102,883   | 102,633   | 104,276   | 116,200   | 116,500   | 91,905                          | 95,919    | 96,427    | -    | -    | -    | 86.49                                     | 93.23  | 93.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 3,089                          | 3,090     | 3,090     | 4,090     | 3,200     | 3,260     | 3,074                           | 3,090     | 3,090     | -    | -    | -    | 99.51                                     | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 81,591                         | 78,274    | 70,107    | 69,304    | 83,250    | 83,500    | 78,529                          | 76,794    | 69,002    | -    | -    | -    | 96.25                                     | 98.11  | 98.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 84,783                         | 66,795    | 59,433    | 75,054    | 99,250    | 99,250    | 72,866                          | 65,858    | 59,355    | -    | -    | -    | 85.94                                     | 98.60  | 99.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 19,325                         | 11,808    | 24,697    | 13,492    | 16,000    | 16,000    | 19,312                          | 10,831    | 24,678    | -    | -    | -    | 99.93                                     | 91.73  | 99.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | -                              | -         | -         | -         | 5,350     | 5,350     | -                               | -         | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | -                              | -         | -         | -         | -         | 12,560    | -                               | -         | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 55,800                         | 35,040    | 35,040    | 35,040    | 34,560    | 34,560    | 55,800                          | 34,560    | 34,560    | -    | -    | -    | 100.00                                    | 98.63  | 98.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | -                              | -         | 4,000     | 10,000    | 10,000    | 10,000    | -                               | -         | 2,380     | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00   | 59.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman   | 304,080                        | 112,140   | 75,192    | 82,000    | 224,972   | 290,500   | 268,281                         | 76,006    | 47,228    | -    | -    | -    | 88.23                                     | 67.78  | 62.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                   | 787,646                        | 911,248   | 978,956   | 882,950   | 796,320   | 593,852   | 783,422                         | 896,416   | 965,075   | -    | -    | -    | 99.46                                     | 98.37  | 98.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah                  | 371,100                        | 296,300   | 153,900   | 236,775   | 295,710   | 256,320   | 370,900                         | 195,333   | 140,413   | -    | -    | -    | 99.95                                     | 65.92  | 91.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian   | Anggaran pada tahun (Rp (000)) |         |         |         |         |         | Realisasi pada tahun (Rp (000)) |         |         |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |       |      |      |      |
|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|
|  | 2016                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2016                            | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                                      | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)                            | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)     | (8)                             | (9)     | (10)    | (11) | (12) | (13) | (14)                                      | (15)  | (16)  | (17) | (18) | (19) |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | 2,530,231                      | 899,529 | 602,896 | 857,815 | 482,700 |         | 2,320,535                       | 828,923 | 529,989 | -    | -    |      | 91.71                                     | 92.15 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pembangunan Gedung Kantor                                | -                              | 156,301 | -       | 277,090 | -       | -       | -                               | 154,537 | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 98.87 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Mobil Jabatan                                  | 1,610,000                      | -       | -       | -       | -       | -       | 1,516,340                       | -       | -       | -    | -    | -    | 94.18                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas               | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | 162,600                        | 260,877 | 221,450 | 34,050  | 65,050  | 65,800  | 156,642                         | 247,695 | 208,738 | -    | -    | -    | 96.34                                     | 94.95 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                        | 313,000                        | 103,280 | 41,300  | 198,000 | 65,500  | 65,760  | 263,473                         | 102,345 | 38,649  | -    | -    | -    | 84.18                                     | 99.09 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Mebeleur                                       | 135,200                        | 61,750  | 79,050  | 41,800  | -       | -       | 113,000                         | 54,850  | 68,000  | -    | -    | -    | 83.58                                     | 88.83 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                   | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | 174,000                        | 146,700 | 107,500 | 126,000 | 172,500 | 172,500 | 171,578                         | 145,538 | 107,086 | -    | -    | -    | 98.61                                     | 99.21 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                 | 76,031                         | 113,771 | 105,296 | 134,475 | 77,000  | 77,500  | 56,372                          | 80,358  | 74,591  | -    | -    | -    | 74.14                                     | 70.63 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | -                              | -       | -       | -       | 41,500  | 11,500  | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | 28,000                         | 25,450  | 22,800  | 25,400  | 29,750  | 29,750  | 14,560                          | 15,400  | 11,900  | -    | -    | -    | 52.00                                     | 60.51 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor       | 31,400                         | 31,400  | 25,500  | 21,000  | 31,400  | 31,400  | 28,570                          | 28,200  | 21,025  | -    | -    | -    | 90.99                                     | 89.81 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                      | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas                    | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>             | 134,400                        | 24,300  | 48,000  | 49,500  | 120,995 |         | 126,700                         | 23,760  | 44,460  | -    | -    |      | 94.27                                     | 97.78 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| pengadaan pakaian dinas dan atributnya                   | 54,300                         | -       | -       | -       | 32,495  | 31,500  | 51,900                          | -       | -       | -    | -    | -    | 95.58                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu              | 80,100                         | 24,300  | 48,000  | 49,500  | 38,500  | 31,500  | 74,800                          | 23,760  | 44,460  | -    | -    | -    | 93.38                                     | 97.78 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian  | Anggaran pada tahun (Rp (000)) |         |           |           |         |           | Realisasi pada tahun (Rp (000)) |         |           |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |        |      |      |      |
|---|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|------|------|------|---|-------|--------|------|------|------|
|   | 2016                           | 2017    | 2018      | 2019      | 2020    | 2021      | 2016                            | 2017    | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                                      | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)   | (2)                            | (3)     | (4)       | (5)       | (6)     | (7)       | (8)                             | (9)     | (10)      | (11) | (12) | (13) | (14)                                      | (15)  | (16)   | (17) | (18) | (19) |
| <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | -                              | -       | -         | -         | 25,000  | 25,000    | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | -                              | -       | -         | -         | 25,000  | 25,000    | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran  | -                              | -       | -         | -         | -       | -         | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                     | -                              | -       | -         | -         | -       | -         | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | -                              | -       | -         | -         | -       | -         | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | 376,950                        | 324,300 | 296,380   | 221,750   | 234,452 | 135,522   | 304,785                         | 251,530 | 253,207   | -    | -    | -    | 80.86                                     | 77.56 | 85.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 376,950                        | 324,300 | 296,380   | 221,750   | 234,452 | 135,522   | 304,785                         | 251,530 | 253,207   | -    | -    | -    | 80.86                                     | 77.56 | 85.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   | 1,562,774                      | 947,570 | 1,294,341 | 1,336,245 | 943,541 | 1,264,317 | 1,025,134                       | 647,739 | 1,174,449 | -    | -    | -    | 65.60                                     | 68.36 | 90.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Rancangan RPJMD  | 144,511                        |         |           |           |         | 100,000   | 124,840                         |         |           |      |      |      | 86.39                                     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD  | 136,425                        |         |           |           |         | 75,000    | 79,940                          |         |           |      |      |      | 58.60                                     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penetapan RPJMD   | 190,475                        |         |           |           |         | 75,000    | 154,955                         |         |           |      |      |      | 81.35                                     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Rancangan RKPD   | 167,591                        | 151,010 | 149,610   | 395,900   | 150,000 | 150,000   | 130,405                         | 150,475 | 143,972   | -    | -    | -    | 77.81                                     | 99.65 | 96.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyelenggaraan Musrenbang RKPD   | 142,265                        | 57,525  | 55,250    | 74,150    | 130,000 | 100,000   | 80,573                          | 54,632  | 54,312    | -    | -    | -    | 56.64                                     | 94.97 | 98.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penetapan RKPD  | 157,750                        | 50,250  | 42,250    | 44,000    | 95,000  | 92,000    | 109,330                         | 49,750  | 41,850    | -    | -    | -    | 69.31                                     | 99.00 | 99.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | -                              | -       | -         | -         | -       | -         | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan perubahan RKPD   | -                              | 86,200  | 186,991   | 197,100   | 197,100 | 197,100   |                                 | 76,001  | 154,160   | -    | -    | -    | 0.00                                      | 88.17 | 82.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning                               | -                              | 181,350 | 190,885   | 277,260   | 150,000 | 100,000   | -                               | 34,600  | 183,004   | -    | -    | -    | 0.00                                      | 19.08 | 95.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Restra   | 22,037                         | -       | -         | -         | -       | 53,667    | 17,110                          | -       | -         | -    | -    | -    | 77.64                                     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur   | -                              | -       | -         | -         | -       | -         | -                               | -       | -         | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan                                  | 109,160                        | 41,450  | 43,855    | 48,825    | 86,441  | 86,550    | 61,270                          | 36,000  | 43,855    | -    | -    | -    | 56.13                                     | 86.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur                 | 112,750                        | 114,000 | 123,850   | 114,850   | 85,000  | 85,000    | 85,295                          | 95,206  | 105,553   | -    | -    | -    | 75.65                                     | 83.51 | 85.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan                                    | 379,810                        | 265,785 | 188,660   | 184,160   | 50,000  | 100,000   | 181,416                         | 151,075 | 180,923   | -    | -    | -    | 47.76                                     | 56.84 | 95.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian   | Anggaran pada tahun (Rp (000)) |         |         |        |        |         | Realisasi pada tahun (Rp (000)) |         |         |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |       |      |      |      |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|
|  | 2016                           | 2017    | 2018    | 2019   | 2020   | 2021    | 2016                            | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                                      | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)                            | (3)     | (4)     | (5)    | (6)    | (7)     | (8)                             | (9)     | (10)    | (11) | (12) | (13) | (14)                                      | (15)  | (16)  | (17) | (18) | (19) |
| Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025   | -                              | -       | 312,990 | -      | -      | -       | -                               | -       | 266,820 | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026   | -                              | -       | -       | -      | -      | 50,000  | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kegiatan Review Perda Kab. Kotim No. 5 tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035                            | -                              | -       | -       | -      | -      | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>   | -                              | 130,008 | -       | -      | -      | -       | -                               | 116,653 | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 89.73 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  | -                              | -       | -       | -      | -      | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas  | -                              | -       | -       | -      | -      | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional   | -                              | 130,008 | -       | -      | -      | -       | -                               | 116,653 | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 89.73 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>   | 12,960                         | 119,427 | 75,435  | 65,920 | 35,000 | 143,156 | 12,960                          | 98,694  | 31,660  | -    | -    | -    | 100.00                                    | 82.64 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur  | -                              | 53,710  | -       | -      | -      | 38,156  | -                               | 51,610  | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 96.09 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat                                    | -                              | -       | -       | -      | -      | 25,000  | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  | 12,960                         | 39,710  | 36,260  | 31,770 | 35,000 | 35,000  | 12,960                          | 26,541  | 20,300  | -    | -    | -    | 100.00                                    | 66.84 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan  | -                              | -       | -       | -      | -      | 45,000  | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  | -                              | 26,007  | 39,175  | 34,150 | -      | -       | -                               | 20,543  | 11,360  | -    | -    | -    | 0.00                                      | 78.99 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>  | 150,400                        | -       | -       | -      | -      | -       | 108,150                         | -       | -       | -    | -    | -    | 71.91                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD   | 150,400                        | -       | -       | -      | -      | -       | 108,150                         | -       | -       | -    | -    | -    | 71.91                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2005-2025 | -                              | -       | -       | -      | -      | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2015-2035 | -                              | -       | -       | -      | -      | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |                                |         |         |        |        |         |                                 |         |         |      |      |      | 0.00                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian   | Anggaran pada tahun (Rp (000)) |         |         |         |         |         | Realisasi pada tahun (Rp (000)) |         |         |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |        |      |      |      |
|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|---|-------|--------|------|------|------|
|  | 2016                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2016                            | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                                      | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)                            | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)     | (8)                             | (9)     | (10)    | (11) | (12) | (13) | (14)                                      | (15)  | (16)   | (17) | (18) | (19) |
| <b>Program Pengembangan data/Informasi</b>   | 37,800                         | 36,250  | 40,640  | 37,500  | 89,640  | 100,640 | 37,772                          | 28,649  | 36,219  | -    | -    | -    | 99.93                                     | 79.03 | 89.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan  | 22,500                         | 11,250  | 9,000   | 9,000   | 9,000   | 20,000  | 22,500                          | 3,750   | 6,000   | -    | -    | -    | 100.00                                    | 33.33 | 66.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Publikasi Hasil Pembangunan  | 15,300                         | 25,000  | 31,640  | 28,500  | 25,000  | 25,000  | 15,272                          | 24,899  | 30,219  | -    | -    | -    | 99.82                                     | 99.60 | 95.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) | -                              | -       | -       | -       | 55,640  | 55,640  | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah</b>                           | 130,620                        | 212,550 | 196,175 | 202,850 | 322,000 |         | 110,670                         | 164,300 | 182,704 | -    | -    | -    | 84.73                                     | 77.30 | 93.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan   | 130,620                        | 137,000 | 137,000 | 137,100 | 137,000 | 125,484 | 110,670                         | 111,150 | 124,920 | -    | -    | -    | 84.73                                     | 81.13 | 91.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penguatan Kelembagaan IPTEK  | -                              | 75,550  | 9,250   | 65,750  | 60,000  | 110,000 |                                 | 53,150  | 7,990   | -    | -    | -    | 0.00                                      | 70.35 | 86.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)  | -                              | -       | -       | -       | -       | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah                                | -                              |         | 300     | -       | 80,000  | 80,000  | -                               | -       | 300     | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rapat koordinasi kelitbangan   | -                              | -       | 49,625  |         | 45,000  | 15,000  | -                               | -       | 49,494  | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 99.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026   | -                              | -       | -       | -       | 80,620  | -       | -                               | -       | -       | -    | -    | -    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**BAB**

**3**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## BAB 3

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan, kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian pembangunan sehingga perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat tepat dan terarah. Selain itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, memperhatikan kekuatan dan kelemahan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi Bappeda menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021).

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh. Secara normatif,

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran melalui sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL); dan
5. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah dibidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.

2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas

Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SOPD. Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SOPD karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SOPD. Untuk menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal, maka setiap penyusunan perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan kebijakan, mengalami pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial).

Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial), menyebabkan kebijakan pembangunan yang disusun kurang sesuai dengan kondisi dilapangan.

4. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi. Perencanaan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

5. Kurangnya koordinasi dengan *stakeholders* dalam penyusunan program pembangunan

Koordinasi adalah kerjasama untuk membina hubungan saling pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya masing-masing dengan tujuan yang sama. Pengendalian dan koordinasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, fungsi koordinasi dalam perencanaan sangat penting dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target pembangunan daerah. Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan program pembangunan menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh Bappeda agar setiap tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.

6. Belum terintegrasinya software E-Planning, E-Budgeting dan E-Pelaporan dalam rangka membangun perencanaan , penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi.

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Sistem informasi perencanaan , penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan bukti melalui *decision supporting system*.

7. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan salah satu ciri penyusunan dan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin suatu

program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 46 orang pegawai yang terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 25 orang staf dan 1 orang tenaga fungsional perencana dan peneliti. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja, namun dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang keahlian yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Aspek Kajian  | Kondisi Saat Ini   | Standar yang Digunakan   | Faktor yang Memengaruhi   |  | Permasalahan Pelayanan Bappeda  |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  |  | Internal  | Eksternal  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan Pembangunan</li> <br/> <li>▪ Pengendalian Pembangunan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan/evaluasi .</li> <li>▪ Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase SOPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD</li> <li>▪ Persentase SOPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan</li> </ul> | <p>Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas</li> <li>▪ Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja</li> </ul> | <p>Terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur di bidang perencanaan dan penelitian</p>        |
|   |  |  | <p>Koordinasi dengan <i>stakeholders</i> di bidang data masih kurang</p>  | <p>Adanya keinginan bersama antar SOPD dan pihak terkait dalam penyeragaman data</p>   | <p>Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas</p>          |
|   |  |  | <p>Kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p>  | <p>Tingginya tuntutan masyarakat (<i>stake holders</i>) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah</p>                               | <p>Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat</p>                    |
|   |  |  | <p>Belum optimalnya peran aktif SOPD terhadap perencanaan</p>   | <p>Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Kotawaringin Timur yang lebih</p>  | <p>Kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam penyusunan program pembangunan</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | baik   |  |
|  |  |  | Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal  | Keterbukaan informasi dan komunikasi                                   | Aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan |
|  |  |  | Hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang | Ketersediaan media komunikasi elektronik yang dapat diakses kapan saja | Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan       |

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2005-2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Kotawaringin Timur, yaitu:

***“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”***

Visi Pembangunan tahun 2016-2021, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi misi periode 2010-2015. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, potensi sumberdaya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan pembangunan daerah maupun konflik internal-eksternal, isu-isu strategis masa datang yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”***

Disingkat menjadi Motto : **Manis Manasai.**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih berperan dalam perubahan

yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global. Visi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki nilai strategis dalam pengembangan generasi mendatang. Visi tersebut diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

**Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.** Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, unggul, kreatif, inovatif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan humanis, berakhlak mulia, dan berorientasi masa depan melalui pendidikan yang berkualitas dan merata dalam rangka membangun Kotim sejahtera.

**Misi Kedua : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.** Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mendorong aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga** : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.** Hal Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian hukum, dan akuntabilitas publik.

**Misi Keempat:** **Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.** Hal ini bertujuan untuk menguatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif.

**“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”**

Penyediaan infrastruktur sebagai penekanan utama menjadi upaya penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan

di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021 pada 9 (sembilan) prioritas, yaitu :

1. Infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Ketahanan pangan
5. Penguatan pemerintahan desa
6. Pemberdayaan ekonomi
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Penanggulangan Bencana
9. Pariwisata dan Pelestarian Budaya

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Bappeda mempunyai peran dan tugas yang sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya cita-cita tersebut. Keterkaitan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terletak di misi ketiga RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sehingga Bappeda berusaha memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada Tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program**  
**Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021**

| Misi dan Program Bupati   | Permasalahan Pelayanan Bappeda  | Faktor Yang Memengaruhi  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | Penghambat   | Pendorong  |
| 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | 1. Terbatasnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terkait<br><br>2. Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang dan fungsi tambahan<br><br>3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal | 1. Masih tingginya ego sektoral pada Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda<br><br>2. Adanya kebijakan-kebijakan baru tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan sehingga program yang telah disepakati menjadi terabaikan<br><br>3. Terdapat kewenangan penanganan urusan pemerintahan yang tumpang tindih | 1. Adanya kegiatan Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat<br><br>2. Telah tersusunnya dokumen RPJPD dan RPJMD Kab. Kotim sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Perangkat Daerah<br><br>3. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan |

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SOPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SOPD kabupaten/kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SOPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa Bappenas memiliki 4 peran yaitu (1)

penyusun kebijakan/pengambil keputusan; (2) think-tank; (3) koordinator dan (4) administrator. Masing-masing peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

| <b>POLICY/DEISION MAKER</b> |   | <b>THINK-TANK</b> |  | <b>KOORDINATOR</b> |   | <b>ADMINISTRATOR</b> |   |
|-----------------------------|---|-------------------|--|--------------------|---|----------------------|---|
| 1.                          | Penyusunan rencana pembangunan nasional                     | 1.                | Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya                         | 1.                 | Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. | 1.                   | Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)            |
| 2.                          | Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara | 2.                | Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif. | 2.                 | Koordinasi pencarian sumber dana pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana.  | 2.                   | Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan. |

|    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 3. | Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.                                | 3. | Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil. | 3. | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana. | 3. | Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. |
| 4. | Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. | 4. |  | 4. | Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.  | 4. | Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.         |

Tabel 3.3

Peran dan Fungsi Kementerian PPN/BAPPENAS

Sumber : Renstra Bappenas 2015-2019

Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun kedepan yaitu (1) mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan (2) mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Sasaran strategis dari tujuan pertama yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional, dan sasaran strategis dari tujuan kedua yaitu terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas tersebut, terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut;
2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti *new initiative* yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya.

Secara jelas identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**

| Sasaran Renstra Bappenas   | Permasalahan Pelayanan Bappeda  | Faktor yang Memengaruhi  |  |
|--|---|--|--|
|  |   | Penghambat   | Pendorong  |
| 1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, | 1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam | 1. Terbatasnya SDM perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, | 1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan</p> <p>2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional</p> | <p>menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut</p> <p>2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti <i>new inisiative</i> yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya</p> | <p>penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel</p> <p>2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro</p> | <p>peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotim</p> <p>2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan SOPD</p> <p>3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah</p> |
|---|--|--|---|

**Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi**

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan lingkungan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap pada batas-batas kewajaran.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang ditujukan untuk perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini, daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015.

Tata ruang kewilayahan dalam pelaksanaan beberapa Perangkat Daerah yang diformulasikan secara kewilayah yang diamanatkan dalam oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi beberapa program :

1. Program pembentukan struktur ruang kota;
2. Program perkuatan system hirarki pusat pertumbuhan kota;
3. Program peningkatan berfungsinya kawasan lindung wilayah;
4. Program peningkatan berfungsinya kawasan budidaya wilayah;
5. Program peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agriindustri serta jasa perdagangan tingkat regional;
7. Program penyusunan rencana detail tata ruang kota;
8. Program peningkatan perijinan bangunan;
9. Program penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
10. Program koordinasi penataan ruang dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi.

Secara lebih jelasnya keterkaitan permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

| Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kotawaringin Timur  | Permasalahan Pelayanan Bappeda   | Faktor yang Memengaruhi   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Penghambat  | Pendorong  |
| Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Kota Sampit, meliputi Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Kecamatan Seranau   | Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu   | Kualitas aparatur perencana belum memadai   | Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan pengembangan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan |
| Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP) diarahkan pada Samuda, Parenggean, dan Simpang Sebabi  | Tidak optimalnya koordinasi antar SOPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah | Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan | Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan   |
| Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Bagendang, Ujung Pandaran, Bapinang, Kota Besi, Cempaka Mulia, Pundu, Tumbang Penyahuan, Tumbang Kalang, Kuala Kuayan, Tumbang Mangkup, dan Luwuk Sampun | Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu   | Kualitas aparatur perencana belum memadai   | Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan   |
| Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan ke Gunung Makmur, Beringin Agung, Lempuyang, Tangar, Bagendang Tengah, Pelantaran, Tumbang Sangai, dan Tumbang Batu                                     | Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu   | Kualitas aparatur perencana belum memadai   | Potensi sebagai pusat pengembangan fasilitas pendidikan dan olah raga, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa   |

Kedepannya diperlukan RTRW dan KLHS yang berhubungan dengan sistem perencanaan baik di daerah, provinsi bahkan nasional sehingga dalam perencanaan kajian lingkungan hidup strategis yang berkaitan dalam konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup perlu mendapat dukungan secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, didukung dengan substansi program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam yang dikaitkan dengan iklim global yang tidak menentu. Dengan memperhatikan kondisi daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur disamping adanya program diatas, permasalahan ini tidak akan dapat diatasi tanpa adanya komitmen dari tingkat Pemerintahan Pusat sampai dengan Pemerintahan Desa serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya. Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan peneliti untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan daerah;
2. Optimalisasi kelembagaan perencanaan dan kelitbangan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel;
6. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
7. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan;
9. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
10. Tuntutan kelengkapan jenis dan akurasi data dalam dokumen perencanaan agar informasi dan prediksi kondisi ke depan dilakukan dan dipertanggungjawabkan (kredibel);
11. Kecenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan stake holder lainnya dalam perencanaan pembangunan

dan semakin meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan;

12. Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
13. Tuntutan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan agar tujuan dan sasaran pemerintahan mengalir dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

**BAB**

**4**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan.

Keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner, banyak aspek yang harus menjadi perhatian karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan serta menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan urusan sesuai dengan kewenangan daerah serta penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran**  
**Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**



Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Bappeda, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

| Tujuan RPJMD                                   | Tujuan PD  | Sasaran PD  | Indikator Kinerja Sasaran PD                 | Target indikator sasaran PD |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|  |  |   |  | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik | Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan                       | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD      | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD  | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD     | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | B                           | B    | B    | B    | B    | B    |
|  |  |   |  |                             |      |      |      |      |      |

|  |  |   |   |     |     |     |           |           |           |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
|  |  | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | N/A | 50% | 50% | 75%       | 75%       | 75%       |
|  |  |   |   |     |     |     |           |           |           |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan                   | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan                        | N/A | N/A | N/A | Memuaskan | Memuaskan | Memuaskan |

**Tabel 4.3**  
**Capaian Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**  
**Tahun 2016 – 2021(setelah perubahan Rensta)**

| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | Capaian Kinerja Tahun ke- |           |        |           |        |           | Target Kinerja Tahun ke- |           |           |           |           |           |
|--|------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                    |   |  | 2016                      |           | 2017   |           | 2018   |           | 2019                     |           | 2020      |           | 2021      |           |
|  |                                    |   |  | 5                         | 6         | 7      | 8         | 9      | 10        |                          |           |           |           |           |           |
| 1  | 2                                  | 3   | 4  | Target                    | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target                   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target    | Realisasi |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan | N/A                       | N/A       | N/A    | N/A       | N/A    | N/A       | Memuaskan                | N/A       | Memuaskan | N/A       | Memuaskar | N/A       |
|  |                                    | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah                  | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD                        | N/A                       | N/A       | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|  |                                    |   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD                    | N/A                       | N/A       | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |

|  |  |   |   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD  | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan                     | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | N/A | N/A | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    |
|  |  | <b>Sasaran 4</b><br>Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | N/A | N/A | 100% | 50%  | 50%  | 0%   | 50%  | 0%   | 50%  | NA   | 50%  | NA   |

**BAB**

**5**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## BAB 5

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :



### Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Sratategi , dan Kebijakan

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
RENSTRA SKPD

PERIODE : 2016-2021

VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

| No | Tujuan  | Sasaran |  | Strategi  | Arah Kebijakan |  |
|----|---|---------|--|---|----------------|--|
| 1  | 2   | 3       |  | 4   | 5              |  |
| 1  | Penguatan perencanaan pembanguna yang berkualitas | 3.1.1   | Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah                                     | 3.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan | 3.1            | Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak |
|    |   | 3.1.2   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sector perencanaan dan dan kelitbangan                  |   |                |  |
|    |   | 3.1.3   | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam Apengambilan kebijakan daerah |   |                |  |

|  |  |       |   |  |  |  |
|--|--|-------|---|--|--|--|
|  |  | 3.1.4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sector perencanaan dan kelitbangan |  |  |  |
|--|--|-------|---|--|--|--|

*Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021*

Keterkaitan Program – program yang mendukung pencapaian sasaran , indikator kinerja sasaran serta strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur , akan lebih mudah untuk dipahami dengan tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD**  
**PERIODE : 2016-2021**

**SATKER : 40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

| No    | Sasaran  | Strategi dan Arah kebijakan |  | Indikator Kinerja<br>(Outcome) |  | Capaian Kinerja |               | Program Pembangunan Daerah |  | Bidang Urusan | Ket |
|-------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--|---------------|-----|
|       |  |                             |  |                                |  | Kondisi Awal    | Kondisi Akhir |                            |  |               |     |
| 1     | 2  | 3                           |  | 4                              |  | 5               | 6             | 7                          |  | 8             | 9   |
| 3.1.1 | Meningkatnya sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah | 3.1                         | Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak | 1                              | Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD      | 100%            | 100%          | 403.21                     | Program perencanaan pembangunan daerah | Perencanaan   |     |
|       |  |                             |  | 2                              | Tingkat keselarsan Renstra PD terhadap RPJMD |                 |               |                            |  |               |     |

|       |   |  |  |   |   |           |           |        |   |                             |
|-------|---|--|--|---|---|-----------|-----------|--------|---|-----------------------------|
|       |   |  |  | 3 | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD  |           |           |        |   |                             |
| 3.1.2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sector perencanaan dan dan kelitbangan                 |  |  |   | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah (PD)                                       | B         | B         | 403.21 | Program perencanaan pembangunan daerah                        | Perencanaan                 |
|       |   |  |  |   |   |           |           | 403.23 | Program perencanaan sosial dan budaya                         | Perencanaan                 |
|       |   |  |  |   |   |           |           | 403.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah          | Statistik                   |
| 3.1.3 | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah |  |  |   | Persentase hasil penelitian / kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | 50%       | 75%       | 403.26 | Program penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah | Penelitian dan pengembangan |
| 3.1.4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sector perencanaan dan                               |  |  |   | Meningkatnya kualitas pelayanan pada  | Memuaskan | Memuaskan | 403.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Rutin                       |

|  |             |  |  |  |                                    |  |  |        |  |       |
|--|-------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--------|--|-------|
|  | kelitbangan |  |  |  | sector perencanaan dan kelitbangan |  |  |        |  |       |
|  |             |  |  |  |                                    |  |  | 403.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rutin |
|  |             |  |  |  |                                    |  |  | 403.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur              | Rutin |
|  |             |  |  |  |                                    |  |  | 403.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rutin |

**BAB**

**6**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

## BAB 6

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Secara umum pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016- 2021.

Sebagai lembaga atau instansi perencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016-2021. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

## 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang mana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Bappeda dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas.

Rencana program dan kegiatan serta indikator dan pendanaan yang disusun didalam rencana strategis ini bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan lima tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan berkembangnya permasalahan pembangunan.

Sesuai dengan visi - misi Kepala daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bappeda ditentukanlah program – program dan kegiatan. Pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program, sebagai berikut :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi (Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur),
2. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kab. Kotawaringin Timur ( mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021)
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja(Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator)
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan (Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK)

Program-program yang disusun merupakan kumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun berjalan secara terpadu dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut program-program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur. Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang direncanakan pada periode Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-VI C.27.

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

| <b>N0.</b> | <b>Program</b>                                 | <b>Kegiatan</b>   |
|------------|--|---|
| 1          | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | Penetapan RKPD  |
|            |  | Penyusunan Perubahan RKPD   |
|            |  | Revisi RPJPD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025                              |
|            |  | Kegiatan Penyusunan Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026 |
|            |  | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning                           |
|            |  | Penyusunan rancangan RPJMD  |
|            |  | Penyusunan Renstra  |
|            |  | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD  |
|            |  | Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan                              |
|            |  | Penetapan RPJMD   |
|            |  | Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan   |
|            |  | Penyusunan rancangan RKPD   |
|            |  | Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan                                |
|            |  | Penyelenggaraan musrenbang RKPD   |
|            |  |   |
| 2          | <b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b> | Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional  |
|            |  | Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi  |
| 3 | <b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>                         | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan  |
|   |  | Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah  |
|   |  | Penguatan Kelembagaan TKPK Kab. Kotim  |
|   |  | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan Kesra   |
|   | <b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>    | Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Kab. Kotim Tahun 2015-2035 |
|   |  | Peningkatan Kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah   |
|   |  | Penyusunan KLHS untuk Reviu Perda Kab, Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab Kotim Tahun 2005-2025            |
| 4 | <b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>          | Publikasi Hasil Pembangunan  |
|   |  | Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur                      |
|   |  | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan                               |
| 5 | <b>Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah</b> | Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan   |
|   |  | Penguatan kelembagaan IPTEK  |
|   |  | Kajian pembangunan Ekososbud   |
|   |  | Kajian pembangunan infrastruktur daerah  |
|   |  | Penelitian/pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah  |
|   |  | Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 6 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | Penyediaan jasa surat menyurat   |
|   |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |
|   |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      |
|   |  | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS                     |
|   |  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                            |
|   |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
|   |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |
|   |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |
|   |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |
|   |  | Penyediaan alat tulis kantor   |
|   |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |
|   |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           |
|   |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |
|   |  | Penyediaan peralatan rumah tangga                                      |
|   |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |
|   |  | Penyediaan bahan logistik kantor                                       |
|   |  | Penyediaan makanan dan minuman   |
|   |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   |
|   |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                     |
|   |  |  |
| 7 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | Pembangunan gedung kantor  |
|   |  | Pengadaan mobil jabatan  |
|   |  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                             |
|    |   | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                   |
|    |   | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas                                |
|    |   | Pengadaan peralatan gedung kantor                                      |
|    |   | Pengadaan meubeleir  |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                                 |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                               |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                  |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas               |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                     |
|    |   | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                    |
|    |   | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                                  |
|    |   |  |
| 8  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                        |
|    |   | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                            |
|    |   |  |
| 9  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | Pendidikan dan pelatihan formal  |
|    |   |  |
| 10 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
|    |   | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                               |
|    |   | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                      |
|    |   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              |

## 6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappaeda pada periode lima tahun kedepan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, indikator sasaran, dan pagu indikatif.

**Tabel 6.2 Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran**

| Tujuan pada RPJMD                              | Indikator Tujuan pada RPJMD     | Sasaran RPJMD   | Indikator sasaran pada RPJMD  | Tujuan PD  | Indikator Tujuan pada Renstra PD   | Sasaran PD  | Indikator Sasaran PD  |
|--|---------------------------------|---|---|--|------------------------------------|---|---|
| Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Meningkatnya aspek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan                      | Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan  |
|  |                                 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi                        | Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) |  |                                    | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah                  | 2.1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD<br><br>2.2. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD<br><br>2.3. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD |
|  |                                 | Meningkatnya kualitas pelayanan                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  |  |                                    | <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya akuntabilitas  | Nilai akuntabilitas kinerja   |

|  |  |        |       |  |  |   |   |
|--|--|--------|-------|--|--|---|---|
|  |  | publik | (IKM) |  |  | kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan  | perangkat daerah  |
|  |  |        |       |  |  | <b>Sasaran 4</b><br>Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan |

**Tabel 6.3**

**Target dan Capaian Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

**Tahun 2016 – 2021**

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | Capaian Kinerja Tahun ke- |           |        |           |        |           | Target Kinerja Tahun ke- |           |           |           |           |           |
|--|---|---|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |   |   | 2016                      |           | 2017   |           | 2018   |           | 2019                     |           | 2020      |           | 2021      |           |
| 1  | 3   | 4   | 5                         |           | 6      |           | 7      |           | 8                        |           | 9         |           | 10        |           |
|  |   |   | Target                    | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target                   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target    | Realisasi |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan  | NA                        | NA        | NA     | NA        | NA     | NA        | Memuaskan                | NA        | Memuaskan | NA        | Memuaskan | NA        |
|  | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah                  | 2.1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD<br><br>2.2. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD<br><br>2.3. Tingkat keselarasan Renja PD | NA                        | NA        | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |

|  |   |   |    |    |      |     |     |    |     |    |     |    |     |    |
|--|---|---|----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|  |   | terhadap RKPD   |    |    |      |     |     |    |     |    |     |    |     |    |
|  | <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan                     | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | NA | NA | B    | B   | B   | B  | B   | B  | B   | B  | B   | B  |
|  | <b>Sasaran 4</b><br>Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | NA | NA | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | NA | 50% | NA |

**Tabel.T-VI.C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Tujuan   | Indikator tujuan                   | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Kode   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi         |   |         |        |
|--|------------------------------------|---|--|--------|--|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|---|---------|--------|
|  |                                    |   |  |        |  |   |   | Tahun-1 (2016)                                |               | Tahun-1 (2017) |               | Tahun-2 (2018) |               | Tahun-3 (2019) |               | Tahun-4 (2020) |               | Tahun-5 (2021) |               |                                  |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |         |        |
|  |                                    |   |  |        |  |   |   | Capaian (%)                                   | Rp            | Capaian (%)    | Rp            | Capaian (%)    | Rp            | target (%)     | Rp            | target (%)     | Rp            | target (%)     | Rp            |                                  |                | target (%)                                      | Rp      |        |
| (1)  | (2)                                | (3)   | (4)  | (5)    | (6)  | (7)   | (8)   | (9)   | (10)          | (11)           | (12)          | (13)           | (14)          | (15)           | (16)          | (17)           | (18)          | (19)           | (20)          | (21)                             |                |   |         |        |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbang | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbang | 4 3 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan | 92,40   | 95  | 2.142.596.464 | 100            | 1.797.837.345 | 85             | 1.818.106.647 | 100            | 1.962.129.850 | 85             | 2.299.683.051 | 85             | 2.136.802.450 | 100                              | 12.157.155.807 | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun   | 100   | 0   | 0             | 100            | 2.700.000     | 100            | 1.800.000     | 85             | 1.850.000     | 85             | 1.850.000     | 85             | 1.850.000     | 85                               | 10.050.000     | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah jasa yang dimantapkan untuk pelayanan kantor per tahun                                 | 100   | 100   | 201.054.589   | 100            | 192.907.280   | 85             | 168.235.490   | 85             | 345.500.000   | 85             | 345.520.000   | 85             | 345.550.000   | 85                               | 1.598.767.359  | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                   | NA  | 0   | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0                                | 0              | 0   | Bappeda | Sampit |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara  | 100   | 100   | 58.960.203    | 100            | 33.879.559    | 85             | 14.566.352    | 85             | 87.500.000    | 85             | 87.500.000    | 85             | 87.500.000    | 85                               | 369.906.114    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu   | 100   | 100   | 138.490.000   | 100            | 113.543.600   | 85             | 191.296.288   | 85             | 180.000.000   | 85             | 180.000.000   | 85             | 180.250.000   | 85                               | 983.579.888    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan   | 100   | 100   | 91.905.550    | 100            | 95.919.050    | 85             | 96.426.812    | 85             | 116.200.000   | 85             | 116.200.000   | 85             | 116.500.000   | 85                               | 633.151.412    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan   | 100   | 100   | 3.074.746     | 100            | 3.090.000     | 85             | 3.090.000     | 85             | 3.200.000     | 85             | 3.200.000     | 85             | 3.260.000     | 85                               | 18.914.746     | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor                                     | 100   | 100   | 78.529.650    | 100            | 76.793.650    | 85             | 69.002.400    | 85             | 83.250.000    | 85             | 83.250.500    | 85             | 83.500.000    | 85                               | 474.326.200    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan   | 100   | 100   | 72.866.750    | 100            | 65.857.750    | 85             | 59.354.750    | 85             | 99.000.000    | 85             | 99.250.000    | 85             | 99.250.000    | 85                               | 495.579.250    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan                                  | 100   | 100   | 19.312.500    | 100            | 10.831.500    | 85             | 24.678.200    | 85             | 16.000.000    | 85             | 16.000.000    | 85             | 16.000.000    | 85                               | 102.822.200    | Bappeda   | Sampit  |        |
|  |                                    |   |  |        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                      | NA  | 100   | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 85             | 5.350.000     | 85             | 5.350.000     | 85             | 5.350.000     | 85                               | 16.050.000     | Bappeda   | Sampit  |        |

| Tujuan | Indikator tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi             |                |               |
|--------|------------------|---------|-------------------|------|--|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|        |                  |         |                   |      |  |  |   | Tahun-1 (2016)                                |                      | Tahun-1 (2017) |                    | Tahun-2 (2018) |                    | Tahun-3 (2019) |                    | Tahun-4 (2020) |                    |                                  |                    | Tahun-5 (2021) |               |
|        |                  |         |                   |      |  |  |   | Capaian (%)                                   | Rp                   | Capaian (%)    | Rp                 | Capaian (%)    | Rp                 | target (%)     | Rp                 | target (%)     | Rp                 |                                  |                    | target (%)     | Rp            |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)  | (6)  | (7)  | (8)   | (9)   | (10)                 | (11)           | (12)               | (13)           | (14)               | (15)           | (16)               | (17)           | (20)               | (21)                             |                    |                |               |
|        |                  |         |                   |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan                        | NA  | NA  | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 100                | 12.560.000                       | Bappeda            | Sampit         |               |
|        |                  |         |                   |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100   | 100   | 55.800.000           | 100            | 34.560.000         | 85             | 34.560.000         | 85             | 34.560.000         | 85             | 34.560.000         | 85                               | 34.560.000         | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah bahan logistik yang terserap                                  | NA  | 0   | 0                    | 0              | 60                 | 2.380.164      | 75                 | 10.000.000     | 75                 | 10.000.000     | 75                 | 10.000.000                       | Bappeda            | Sampit         |               |
|        |                  |         |                   |      | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai per tahun   | 100   | 100   | 268.280.400          | 100            | 76.006.000         | 85             | 47.228.000         | 85             | 87.000.000         | 85             | 224.972.551        | 85                               | 290.500.000        | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri  | NA  | 100   | 783.422.076          | 100            | 896.416.292        | 85             | 965.074.655        | 85             | 642.940.000        | 85             | 906.865.375        | 85                               | 593.852.450        | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri | NA  | 100   | 370.900.000          | 100            | 195.332.664        | 85             | 140.413.536        | 85             | 249.779.850        | 85             | 406.255.375        | 85                               | 256.320.000        | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>         | <b>93,70</b>                                    | <b>91,70</b>                                  | <b>2.320.537.343</b> | <b>93,62</b>   | <b>838.922.416</b> | <b>85</b>      | <b>529.990.097</b> | <b>85</b>      | <b>649.000.000</b> | <b>85</b>      | <b>482.700.000</b> | <b>85</b>                        | <b>454.210.000</b> | <b>Bappeda</b> | <b>Sampit</b> |
|        |                  |         |                   |      | Pembangunan Gedung Kantor                                | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                   | NA  | 0   | 0                    | 100            | 154.537.000        | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Mobil Jabatan                                  | Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan                                 | 100   | 100   | 1.516.340.000        | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan                   | 100   | 0   | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas               | Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan              | NA  | 0   | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan                           | NA  | 100   | 156.642.550          | 93,62          | 247.694.915        | 85             | 208.738.050        | 0              | 0                  | 85             | 65.050.000         | 85                               | 65.800.000         | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia                   | NA  | 0   | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                        | Jumlah peralatan yang dibeli   | 100   | 100   | 263.473.000          | 93,62          | 102.345.000        | 85             | 38.649.000         | 85             | 165.000.000        | 85             | 65.500.000         | 85                               | 65.760.000         | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Mebeleur                                       | Jumlah mebeleur yang dibeli  | 100   | 100   | 113.000.000          | 100            | 54.850.000         | 100            | 68.000.000         | 85             | 65.000.000         | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                   | Jumlah Rumah dinas yang terpelihara                                  | NA  | 0   | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0                                | 0                  | Bappeda        | Sampit        |

| Tujuan | Indikator tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi      |   |        |
|--------|------------------|---------|-------------------|------|---|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|--------|
|        |                  |         |                   |      |   |   |   | Tahun-1 (2016)                                |             | Tahun-1 (2017) |             | Tahun-2 (2018) |             | Tahun-3 (2019) |             | Tahun-4 (2020) |             | Tahun-5 (2021) |             |                                  |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |        |
|        |                  |         |                   |      |   |   |   | Capaian (%)                                   | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | target (%)     | Rp          | target (%)     | Rp          | target (%)     | Rp          |                                  |             | target (%)                                      | Rp     |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)        | (11)           | (12)        | (13)           | (14)        | (15)           | (16)        | (17)           | (18)        | (19)           | (20)        | (21)                             |             |   |        |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Luasan gedung kantor yang dipelihara  | 100   | 100   | 171,578,900 | 93,62          | 145,537,750 | 85             | 107,086,500 | 85             | 150,000,000 | 85             | 172,500,000 | 85             | 172,500,000 | 85                               | 919,203,150 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara  | 100   | 100   | 56,372,893  | 93,62          | 90,357,751  | 85             | 74,591,547  | 85             | 176,800,000 | 85             | 77,000,000  | 85             | 77,500,000  | 85                               | 552,622,191 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara                              | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 85             | 31,250,000  | 85             | 41,500,000  | 85             | 11,500,000  | 85                               | 84,250,000  | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                 | Jumlah perlengkapan yang dipelihara   | 100   | 85  | 14,560,000  | 93,62          | 15,400,000  | 85             | 11,900,000  | 85             | 29,550,000  | 85             | 29,750,000  | 85             | 29,750,000  | 85                               | 130,910,000 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                    | Jumlah peralatan yang dipelihara  | 100   | 85  | 28,570,000  | 93,62          | 28,200,000  | 85             | 21,025,000  | 85             | 31,400,000  | 85             | 31,400,000  | 85             | 31,400,000  | 85                               | 171,995,000 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel  | Jumlah peralatan yang terpelihara   | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas   | Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi   | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur</b>           | 100   | 94,27   | 126,700,000 | 100            | 23,760,000  | 100            | 44,460,000  | 100            | 57,000,000  | 100            | 70,995,000  | 100            | 63,000,000  | 100                              | 385,915,000 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya   | Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli                                     | 100   | 100   | 51,900,000  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 100         | 32,495,000     | 100         | 31,500,000     | 100         | 115,895,000                      | Bappeda     | Sampit  |        |
|        |                  |         |                   |      | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu   | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan/dibeli                 | 100   | 100   | 74,800,000  | 100            | 23,760,000  | 100            | 44,460,000  | 100            | 57,000,000  | 100            | 38,500,000  | 100            | 31,500,000  | 100                              | 270,020,000 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi</b>         | N/A   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 90          | 25,000,000     | 90          | 25,000,000     | 100         | 25,000,000     | 90          | 100,000,000                      | Bappeda     | Sampit  |        |
|        |                  |         |                   |      | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | N/A   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 90          | 25,000,000     | 90          | 25,000,000     | 100         | 25,000,000     | 100         | 25,000,000                       | Bappeda     | Sampit  |        |
|        |                  |         |                   |      | Penyusunan laporan keuangan semesteran  | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun                                 | N/A   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                     | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun                        | N/A   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                | N/A   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |

| Tujuan  | Indikator tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |             |                |               |                |               |                |             |                |               | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi        |   |        |
|---|---|--|--|------|---|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|--------|
|   |   |  |  |      |   |   |   | Tahun-1 (2016)                                |               | Tahun-1 (2017) |             | Tahun-2 (2018) |               | Tahun-3 (2019) |               | Tahun-4 (2020) |             | Tahun-5 (2021) |               |                                  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |        |
|   |   |  |  |      |   |   |   | Capaian (%)                                   | Rp            | Capaian (%)    | Rp          | Capaian (%)    | Rp            | target (%)     | Rp            | target (%)     | Rp          | target (%)     | Rp            |                                  |               | target (%)                                      | Rp     |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)          | (11)           | (12)        | (13)           | (14)          | (15)           | (16)          | (17)           | (18)        | (19)           | (20)          | (21)                             |               |   |        |
|   |   |  |  |      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    | Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi | 94.79   | 85  | 304,785,228   | 78             | 251,530,102 | 85             | 253,207,125   | 85             | 256,000,000   | 85             | 234,452,449 | 85             | 135,522,449   | 85                               | 1,435,497,353 | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                       | Meningkatnya kemampuan teknis aparatur                              | 94.79   | 85  | 304,785,228   | 78             | 251,530,102 | 85             | 253,207,125   | 85             | 256,000,000   | 85             | 234,452,449 | 85             | 135,522,449   | 85                               | 1,435,497,353 | Bappeda   | Sampit |
| Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah | Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan |      | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan     | 65  | 90  | 1,025,134,890 | 92             | 647,738,700 | 90             | 1,174,450,497 | 90             | 1,280,360,000 | 90             | 943,540,600 | 90             | 1,264,317,400 | 100                              | 6,335,542,087 | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyusunan Rancangan RPJMD  | Tersusunnya rancangan RPJMD   | 100   | 100   | 124,840,000   | 0              | 0           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           | 100            | 100,000,000   | 100                              | 224,840,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD                                      | Terselenggaranya musrenbang RPJMD                                   | 100   | 100   | 79,940,000    | 0              | 0           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           | 100            | 75,000,000    | 100                              | 154,940,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penetapan RPJMD   | Tersedianya RPJMD   | 100   | 100   | 154,955,000   | 0              | 0           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           | 100            | 75,000,000    | 100                              | 229,955,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyusunan Rancangan RKPD   | Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018                                | 100   | 100   | 130,405,750   | 92             | 150,475,000 | 90             | 143,972,500   | 90             | 150,000,000   | 90             | 150,000,000 | 90             | 150,000,000   | 100                              | 874,853,250   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD                                       | Rancangan RKPD  | 100   | 100   | 80,573,000    | 92             | 54,631,500  | 90             | 54,312,500    | 90             | 130,000,000   | 90             | 130,000,000 | 90             | 100,000,000   | 100                              | 549,517,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penetapan RKPD  | Rancangan Akhir dan Perubahan RKPD                                  | 100   | 100   | 109,330,000   | 92             | 49,750,000  | 90             | 41,850,000    | 90             | 95,000,000    | 90             | 95,000,000  | 90             | 92,000,000    | 100                              | 482,930,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyusunan perubahan RKPD   | Perda dan Perbup Perubahan RKPD                                     | 100   | 0   | 0             | 100            | 76,001,200  | 100            | 154,160,000   | 100            | 197,100,000   | 100            | 197,100,000 | 100            | 197,100,000   | 100                              | 821,461,200   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning               | Implementasi Aplikasi SIMRAL  | N/A   | 0   | 0             | 0              | 34,600,000  | 90             | 183,004,400   | 85             | 277,260,000   | 90             | 150,000,000 | 100            | 100,000,000   | 100                              | 744,864,400   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Penyusunan Renstra  | Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur              | 100   | 100   | 17,110,000    | 0              | 0           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           | 0              | 53,667,400    | 100                              | 70,777,400    | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur                             | Jumlah dokumen RPJMD  | 0   | 0   | 0             | 0              | 0           | 100            | 266,820,000   | 0              | 0             | 0              | 0           | 0              | 0             | 100                              | 266,820,000   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan                  | Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akurat    | 100   | 100   | 61,270,000    | 92             | 36,000,000  | 90             | 43,855,000    | 90             | 86,000,000    | 90             | 86,440,600  | 90             | 86,550,000    | 100                              | 400,115,600   | Bappeda   | Sampit |
|   |   |  |  |      | Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur | Kualitas pembangunan fisik sesuai yang diharapkan                   | 100   | 100   | 85,295,000    | 92             | 95,206,000  | 90             | 105,553,097   | 90             | 95,000,000    | 90             | 85,000,000  | 90             | 85,000,000    | 100                              | 551,054,097   | Bappeda   | Sampit |

| Tujuan | Indikator tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |            |                |             | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi      |   |        |
|--------|------------------|---------|-------------------|------|--|--|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|--------|
|        |                  |         |                   |      |  |  |   | Tahun-1 (2016)                                |             | Tahun-1 (2017) |             | Tahun-2 (2018) |             | Tahun-3 (2019) |             | Tahun-4 (2020) |            | Tahun-5 (2021) |             |                                  |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |        |
|        |                  |         |                   |      |  |  |   | Capaian (%)                                   | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | target (%)     | Rp          | target (%)     | Rp         | target (%)     | Rp          |                                  |             | target (%)                                      | Rp     |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)  | (6)  | (7)  | (8)   | (9)   | (10)        | (11)           | (12)        | (13)           | (14)        | (15)           | (16)        | (17)           | (18)       | (19)           | (20)        | (21)                             |             |   |        |
|        |                  |         |                   |      | Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan                               | Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan                   | 100   | 100   | 181,416,140 | 92             | 151,075,000 | 90             | 180,923,000 | 90             | 250,000,000 | 90             | 50,000,000 | 90             | 100,000,000 | 100                              | 913,414,140 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025                                     | Jumlah dokumen RPJPD   | 0   | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Penyusunan dokumen Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026 | Jumlah dokumen RPJMD   | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 100            | 50,000,000 | 100            | 50,000,000  | 100                              | 50,000,000  | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>                                   | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan | NA  | 0   | 0           | 100            | 116,652,600 | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 0              | 50          | 116,652,600                      | Bappeda     | Sampit  |        |
|        |                  |         |                   |      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                                | Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bid Ekonomi                                   | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas                  | Jumlah dokumen hasil forum   | NA  | 0   | 0           | 100            | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional                                       | dokumen Kesepakatan dan Rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng               | NA  | 0   | 0           | 100            | 116,652,600 | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 0              | 100         | 116,652,600                      | Bappeda     | Sampit  |        |
|        |                  |         |                   |      | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                                     | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan | 79,88   | 50  | 12,960,000  | 83,27          | 78,151,000  | 50             | 20,300,000  | 50             | 35,000,000  | 50             | 35,000,000 | 80             | 143,156,500 | 80                               | 324,567,500 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur                          | Dokumen SPKD dan LP2KD   | NA  | 0   | 0           | 83,27          | 51,610,000  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 80             | 38,156,500  | 80                               | 89,766,500  | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat    | Jumlah rapat dan FGD dengan mitra  | NA  | 0   | 0           | 83,27          | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 80             | 25,000,000  | 80                               | 25,000,000  | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah                                | Jumlah peserta rapat   | NA  | 100   | 12,960,000  | 66,84          | 26,541,000  | 56             | 20,300,000  | 80             | 35,000,000  | 80             | 35,000,000 | 80             | 35,000,000  | 80                               | 164,801,000 | Bappeda   | Sampit |
|        |                  |         |                   |      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan          | laporan hasil Rapat Koordinasi   | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0          | 75             | 45,000,000  | 75                               | 45,000,000  | Bappeda   | Sampit |

| Tujuan   | Indikator tujuan                   | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi      |                |        |
|--|------------------------------------|---|---|------|---|--|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------|
|  |                                    |   |   |      |   |  |   | Tahun-1 (2016)                                |             | Tahun-1 (2017) |             | Tahun-2 (2018) |             | Tahun-3 (2019) |             | Tahun-4 (2020) |             |                                  |             | Tahun-5 (2021) |        |
|  |                                    |   |   |      |   |  |   | Capaian (%)                                   | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | Capaian (%)    | Rp          | target (%)     | Rp          | target (%)     | Rp          |                                  |             | target (%)     | Rp     |
| (1)  | (2)                                | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)  | (8)   | (9)   | (10)        | (11)           | (12)        | (13)           | (14)        | (15)           | (16)        | (17)           | (20)        | (21)                             |             |                |        |
|  |                                    |   |   |      | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                                  | Dokumen Kajian Perencanaan Wilayah dan SDA   | 85  | 85  | 108.150.000 | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | Bappeda     | Sampit         |        |
|  |                                    |   |   |      | Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD  | Laporan Hasil Rapat Telaahan tata ruang  | 85  | 85  | 108.150.000 | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                |             |                |        |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbang                       | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah  |      | Program Pengembangan data/Informasi   | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat | 100   | 100   | 53.045.454  | 80             | 49.192.954  | 90             | 36.219.000  | 90             | 89.640.000  | 90             | 89.640.000  | 90                               | 100.640.000 | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan                        | Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan                   | 100   | 100   | 37.772.727  | 50             | 3.750.000   | 80             | 6.000.000   | 80             | 9.000.000   | 80             | 9.000.000   | 80                               | 20.000.000  | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Publikasi Hasil Pembangunan   | Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim   | 100   | 100   | 15.272.727  | 100            | 24.899.454  | 100            | 30.219.000  | 100            | 25.000.000  | 100            | 25.000.000  | 100                              | 25.000.000  | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan  | NA  | 0   | 0           | 100            | 20.543.500  | 100            | 11.360.000  | 100            | 55.640.000  | 100            | 55.640.000  | 100                              | 55.640.000  | Bappeda        | Sampit |
| Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan |      | Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah                               | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan           | 80  | 85  | 241.351.117 | 60             | 164.300.000 | 50             | 182.704.000 | 50             | 185.000.000 | 65             | 422.000.000 | 75                               | 330.483.651 | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan                                      | Jumlah majalah mediasi   | 80  | 100   | 110.670.000 | 100            | 111.150.000 | 100            | 124.920.000 | 100            | 135.000.000 | 100            | 137.000.000 | 100                              | 125.483.651 | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Penguatan Kelembagaan IPTEK   | Berfungsinya kelembagaan Iptek   | 80  | 0   | 0           | 70             | 53.150.000  | 0              | 7.989.800   | 100            | 50.000.000  | 100            | 60.000.000  | 100                              | 110.000.000 | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)   | Berfungsinya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)  | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 300.000     | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                                | 0           | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah                             | Jumlah Dokumen Hasil Kajian/penelitian   | NA  | 100   | 130.681.117 | 50             | 0           | 0              | 0           | 0              | 50          | 80.000.000     | 100         | 80.000.000                       | Bappeda     | Sampit         |        |
|  |                                    |   |   |      | Rapat koordinasi kelitbang  | Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri  | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 49.494.200  | 0              | 0           | 75             | 45.000.000  | 75                               | 15.000.000  | Bappeda        | Sampit |
|  |                                    |   |   |      | Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026  | Jumlah dokumen KLHS RPJMD  | NA  | 0   | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 100         | 100.000.000    | 0           | 0                                | Bappeda     | Sampit         |        |
|  |                                    |   |   |      |   |  |   | 6.335.260.496                                 |             | 3.968.085.117  |             | 4.059.437.366  |             | 4.539.129.850  |             | 4.824.101.850  |             | 4.653.132.450                    |             |                |        |

**BAB**

**7**

**KINERJA PENYELENGARAAN  
BIDANG URUSAN**

# KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex*

*ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*expost*).

Penetapan indikator kinerja Bappeda untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Bappeda, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappeda untuk sisa tahun perubahan Renstra tiga tahun kedepan dapat diuraikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**

**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

| Tujuan RPJMD                                   | Indikator Kinerja Tujuan RPJMD  | Tujuan PD  | Indikator Kinerja Tujuan PD        | Sasaran RPJMD   | Indikator Kinerja Sasaran RPJMD   | Sasaran PD  | Indikator Kinerja Sasaran PD                 | Program   | Indikator Kinerja Program  | Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|
| 2  | 3                               | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   | 12  | 13  |
| Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas | Tingkat keselarasan terhadap RPJMD | Meningkatnya aspek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan                      | Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan                     | Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD      | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD   | Penyusunan rancangan RKPd   | Tersusunnya rancangan awal RKPd   |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   | Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD  |   | Persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD                                       | Penyelenggaraan musrenbang RKPd   | Rancangan RKPd  |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   | Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPd     |   | Persentase tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPd  | Penetapan RKPd  | Rancangan Akhir dan Perubahan RKPd  |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   |  |   |  | Penyusunan perubahan RKPd   | Perda dan Perbup Perubahan RKPd   |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   |  |   |  | Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning                                     | Implementasi Aplikasi SIMRAL  |
|  |                                 |  |                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi                        | Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) | Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbang | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SOPD | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi                             | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD                      | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD yang disusun |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   |  | Program Pengembangan data/Informasi   | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat | Penyusunan/penyusunan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan                         | Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan      |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   |  |   |  | Publikasi Hasil Pembangunan   | Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim  |
|  |                                 |  |                                    |   |   |   |  |   |  | Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan                                   |

| Tujuan RPJMD | Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | Tujuan PD | Indikator Kinerja Tujuan PD | Sasaran RPJMD                          | Indikator Kinerja Sasaran RPJMD  | Sasaran PD  | Indikator Kinerja Sasaran PD  | Program  | Indikator Kinerja Program   | Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan              |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 2            | 3                              | 4         | 5                           | 6                                      | 7                                | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  | 13                                      |
|              |                                |           |                             |  |                                  | Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan | Program penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah                  | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan            | Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan          | Jumlah majalah mediasi                  |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   |  |   | Penguatan kelembagaan IPTEK                                     | Berfungsinya kelembagaan Itekk          |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   |  |   | Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   |  |   | Rapat koordinasi kelitbangan                                    | Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri   |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   |  |   | Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026                | Jumlah dokumen KLHS RPJMD               |
|              |                                |           |                             | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan                   | Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan                        | Program pelayanan administrasi perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan |   |   |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai   |   |   |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   | Program peningkatan disiplin aparatur  | Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur                                |   |   |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi                           |   |   |
|              |                                |           |                             |  |                                  |   |   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi                              |   |   |

**Tabel T-C.VII.28**  
**Indikator Kinerja Program dan kegiatan**  
**Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra**

| No.  | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra | Capaian Kinerja         |                |                | Target Kinerja |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |            |
|------|--|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------|
|      |  |   |   | Transisi Tahun-1 (2016) | Tahun-1 (2017) | Tahun-2 (2018) | Tahun-3 (2019) | Tahun-4 (2020) | Tahun-5 (2021) |   |            |
|      |  |   |   | Capaian (%)             | Capaian (%)    | Capaian (%)    | target (%)     | target (%)     | target (%)     |   | target (%) |
| 1    |  | 2   | 3                                       | 4                       | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10  |            |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan | 92,40                                   | 95                      | 100            | 85             | 100            | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun   | 100                                     | 0                       | 100            | 100            | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun                                | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                   | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 0          |
| 1.4  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara  | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.5  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu   | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.6  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan   | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.7  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan   | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.8  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor                                     | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.9  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan   | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan                                  | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |
| 1.11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                      | NA                                      | 100                     | 0              | 0              | 85             | 85             | 85             | 85  | 85         |

| No.      | Program dan Kegiatan                                     | Indikator Kinerja  | Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra | Capaian Kinerja         |                |                | Target Kinerja |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |
|----------|--|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
|          |  |  |   | Transisi Tahun-1 (2016) | Tahun-1 (2017) | Tahun-2 (2018) | Tahun-3 (2019) | Tahun-4 (2020) | Tahun-5 (2021) |   |
|          |  |  |   | Capaian (%)             | Capaian (%)    | Capaian (%)    | target (%)     | target (%)     | target (%)     |   |
| 1        |  | 2  | 3                                       | 4                       | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10  |
| 1.12     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan                        | NA                                      | NA                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100   |
| 1.13     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 100   |
| 1.14     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah bahan logistik yang terserap                                  | NA                                      | 0                       | 0              | 60             | 75             | 75             | 75             | 100   |
| 1.15     | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai per tahun   | 100                                     | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 100   |
| 1.16     | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri  | NA                                      | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 100   |
| 1.17     | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri | NA                                      | 100                     | 100            | 85             | 85             | 85             | 85             | 100   |
| <b>2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>         | <b>93,70</b>                            | <b>91,70</b>            | <b>93,62</b>   | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85%</b>                                      |
| 2.1      | Pembangunan Gedung Kantor                                | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                   | NA                                      | 0                       | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 100   |
| 2.2      | Pengadaan Mobil Jabatan                                  | Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan                                 | 100                                     | 100                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100   |
| 2.3      | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan                   | 100                                     | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 2.4      | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas               | Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan              | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 2.5      | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan                           | NA                                      | 100                     | 93,62          | 85             | 0              | 85             | 85             | 85  |
| 2.6      | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia                   | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 2.7      | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                        | Jumlah peralatan yang dibeli   | 100                                     | 100                     | 93,62          | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  |
| 2.8      | Pengadaan Mebeleur                                       | Jumlah mebeleur yang dibeli  | 100                                     | 100                     | 100            | 100            | 85             | 0              | 0              | 85  |
| 2.9      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                   | Jumlah Rumah dinas yang terpelihara                                  | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 2.1      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Luasan gedung kantor yang dipelihara                                 | 100                                     | 100                     | 93,62          | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  |

|      |  |   |            |              |            |            |            |            |            |            |
|------|--|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan               | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara                                  | 100        | 100          | 93,62      | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 2.12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara                    | NA         | 0            | 0          | 0          | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 2.13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Jumlah perlengkapan yang dipelihara                                   | 100        | 85           | 93,62      | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 2.14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor     | Jumlah peralatan yang dipelihara                                      | 100        | 85           | 93,62      | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 2.15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                    | Jumlah peralatan yang terpelihara                                     | NA         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas                  | Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi                               | NA         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>           | <b>Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur</b> | <b>100</b> | <b>94,27</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 3.1  | pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya            | Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli                           | 100        | 100          | 0          | 0          | 0          | 100        | 100        | 100        |
| 3.2  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu            | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan/dibeli       | 100        | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

| No.  | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra | Capaian Kinerja         |                |                | Target Kinerja |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |
|------|--|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
|      |  |   |   | Transisi Tahun-1 (2016) | Tahun-1 (2017) | Tahun-2 (2018) | Tahun-3 (2019) | Tahun-4 (2020) | Tahun-5 (2021) |   |
|      |  |   |   | Capaian (%)             | Capaian (%)    | Capaian (%)    | target (%)     | target (%)     | target (%)     |   |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5                       | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |   |
| 4    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan   | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi                | N/A                                     | 0                       | 0              | 0              | 90             | 90             | 100            | 90  |
| 4.1  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD           | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | N/A                                     | 0                       | 0              | 0              | 90             | 90             | 100            | 100   |
| 4.2  | Penyusunan laporan keuangan semesteran   | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun                                 | N/A                                     | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 4.3  | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun                        | N/A                                     | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 4.4  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                | N/A                                     | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
|      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                        | <b>Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi</b>      | <b>94.79</b>                            | <b>85</b>               | <b>78</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>                                       |
| 5.1  | <b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>   | Meningkatnya kemampuan teknis aparatur  | 94.79                                   | 85                      | 78             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85  |
| 6    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                    | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>          | <b>100</b>                              | <b>90</b>               | <b>92</b>      | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>100</b>                                      |
| 6.1  | Penyusunan Rancangan RPJMD   | Tersusunnya rancangan RPJMD   | 100                                     | 100                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100   |
| 6.2  | Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD   | Terselenggaranya musrenbang RPJMD   | 100                                     | 100                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100   |
| 6.3  | Penetapan RPJMD  | Tersedianya RPJMD   | 100                                     | 100                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100   |
| 6.4  | Penyusunan Rancangan RKPD  | Tersusunnya rancangan awal RKPD   | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.5  | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | Rancangan RKPD  | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.6  | Penetapan RKPD   | Rancangan Akhir dan Perubahan RKPD  | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.8  | Penyusunan perubahan RKPD  | Perda dan Perbup Perubahan RKPD   | 100                                     | 0                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100   |
| 6.9  | Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning                          | Implementasi Aplikasi SIMRAL  | N/A                                     | 0                       | 0              | 90             | 85             | 90             | 100            | 100   |
| 6.1  | Penyusunan Renstra   | Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur                          | 100                                     | 100                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100   |
| 6.11 | Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur  | Jumlah dokumen RPJMD  | 0                                       | 0                       | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 100   |
| 6.12 | Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan                             | Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akurat                | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.13 | Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur            | Kualitas pembangunan fisik sesuai yang diharapkan                               | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.14 | Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan                               | Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan                | 100                                     | 100                     | 92             | 90             | 90             | 90             | 90             | 100   |
| 6.15 | Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025                                     | Jumlah dokumen RPJPD  | 0                                       | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   |
| 6.16 | Penyusunan dokumen Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026 | Jumlah dokumen RPJMD  | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100   |

| No. | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra | Capaian Kinerja         |                |                | Target Kinerja |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |            |
|-----|---|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------|
|     |   |  |   | Transisi Tahun-1 (2016) | Tahun-1 (2017) | Tahun-2 (2018) | Tahun-3 (2019) | Tahun-4 (2020) | Tahun-5 (2021) |   |            |
|     |   |  |   | Capaian (%)             | Capaian (%)    | Capaian (%)    | target (%)     | target (%)     | target (%)     |   | target (%) |
| 1   |   | 2  | 3                                       | 4                       | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10  |            |
| 7   | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                       | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan | NA                                      | 0                       | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 50         |
| 7.1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                             | Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bid Ekonomi                                   | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 0          |
| 7.2 | Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas               | Jumlah dokumen hasil forum   | NA                                      | 0                       | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 0          |
| 7.3 | Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional                                    | dokumen Kesepakatan dan Rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng               | NA                                      | 0                       | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 100        |
| 8   | Program Perencanaan Sosial dan Budaya   | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan | 79,88                                   | 50                      | 83,27          | 50             | 50             | 50             | 80             | 80  | 80         |
| 8.1 | Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur                       | Dokumen SPKD dan LP2KD   | NA                                      | 0                       | 83,27          | 0              | 0              | 0              | 80             | 80  | 80         |
| 8.2 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah rapat dan FGD dengan mitra  | NA                                      | 0                       | 83,27          | 0              | 0              | 0              | 80             | 80  | 80         |
| 8.3 | Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah                             | Jumlah peserta rapat   | NA                                      | 100                     | 66,84          | 56             | 80             | 80             | 80             | 80  | 80         |
| 8.4 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan       | laporan hasil Rapat Koordinasi   | NA                                      | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 75             | 75  | 75         |
| 9   | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                    | Dokumen Kajian Perencanaan Wilayah dan SDA   | 85                                      | 85                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 85         |
| 9.1 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD  | Laporan Hasil Rapat Telaahan tata ruang  | 85                                      | 85                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0   | 85         |

|      |   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10   | Program Pengembangan data/Informasi   | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat | 100 | 100 | 80  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
| 10.1 | Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan                        | Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan                   | 100 | 100 | 50  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| 10.2 | Publikasi Hasil Pembangunan   | Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.3 | Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | pencaapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan   | NA  | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11   | Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah                               | Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan           | 80  | 85  | 60  | 50  | 50  | 65  | 75  | 75  |
| 11.1 | Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan                                      | Jumlah majalah mediasi   | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2 | Penguatan Kelembagaan IPTEK   | Berfungsinya kelembagaan Iptek   | 80  | 0   | 70  | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.3 | Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)   | Berfungsinya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)  | NA  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11.4 | Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah                             | Jumlah Dokumen Hasil Kajian/penelitian   | NA  | 100 | 50  | 0   | 0   | 50  | 100 | 100 |
| 11.5 | Rapat koordinasi kelitbangan  | Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri  | NA  | 0   | 0   | 0   | 0   | 75  | 75  | 75  |
| 11.6 | Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026  | Jumlah dokumen KLHS RPJMD  | NA  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 |

**BAB**

**8**

**PENUTUP**

### 8.1. Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Bappeda dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bappeda juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama pada Perubahan Renstra Bappeda selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangtman daerah adalah bagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 dapat tercapai.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis sangat diperlukan partisipasi, sernangat dan komitmen dan seluruh Aparatur Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai,

Perubahan Renstra Bappeda disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalaminya perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diherikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Bappeda untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah lain dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda menjadi rancangan akhir Renstra Bappeda. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Bappeda, Kepala Badan menetapkan Renstra Bappeda sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda

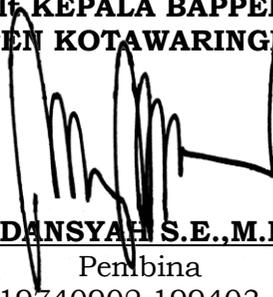
Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Bappeda;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Bappeda;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Bappeda;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Bappeda dilakukan melalui Rencana Kerja Bappeda setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Bappeda setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Bappeda tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Bappeda tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bappeda dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda;

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujud nya *good governance*.

Sampit, 25 April 2019

**Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**RAMADANSYAH S.E., M.Ec.Dev**

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003